

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal 21 bulan Desember tahun 1998
Skripsi dengan judul : "PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARIWISATA MELALUI PT. PURINA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG".

Nama : MOHAMMAD HIDAYAT PANIGORO
Nomor Stb/Nirm : 45 93 021 703/9931100510069
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. A. Gaukadir, MA



Drs. M. Natsir Tompo

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

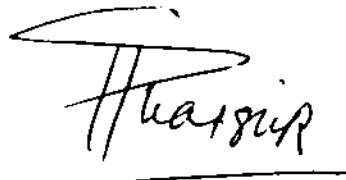
Ketua Jurusan Ilmu Adm

dan Ilmu Politik Universitas "45"

Fisipol Universitas "45"



Drs. Guntur Karneani



Drs. M. Natsir Tompo

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Sabtu tanggal 21 bulan Desember Tahun 1996
Skripsi dengan judul : "PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR MELALUI PT. PURINA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG".

N a m a : MOHAMMAD HIDAYAT PANIGORO

Nomor Stb/Nirm : 4593021703/9931100510069

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu
Administrasi Negara Program Strata Satu (S1).



PENGAWAS UMUM

(Drs. Rektor Jawa Sose. SE, MBA)
Rektor Universitas "45"

(Prof. Dr. H. A. Mappa Nasrun, MA)
Dekan FISIPOL UNHAS

PANITIA UJIAN

(Drs. Guntur Karnaeni)
Ketua

(Drs. Suparman Mekkah)
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
2. Drs. H.P.S. Rahim, MS
3. Drs. A. Gau Kadir, MA
4. Drs. Guntur Karnaeni

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wataalah, karena atas limpahan Rakhmat dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan walau dengan sederhana mungkin kalau tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh keikhlasan hati penulis melalui kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang
3. Bapak Drs. Suparman Mekkah, Bapak Drs. Muklis K. Barata dan Bapak Drs. Husain Hamka, MS. yang masing-masing selaku Pembantu Dekan I, II dan III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

4. Bapak Drs. M. Natsir Tompo, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang sekaligus sebagai Pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. A. Gau Kadir, MA. selaku Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya serta tenaga dan pikiran yang disumbangkan guna memberi bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45", atas segala bantuan dan jerih payahnya mendidik dan membina penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
7. Bapak Kepala Kantor Badan Pengelola Perparkiran beserta seluruh Stafnya yang sangat membantu dalam penelitian penulis.
8. Bapak Kepala Kantor Dipenda Tk. II Ujung Pandang beserta seluruh stafnya.
9. Ayahanda M. Panigoro dan Ibunda Hasna Mokodompis yang tanpa pamrih mendidik dan membimbing penulis yang dengan tulus dan penuh kasih sayang membesarkan men-
doakan keselamatan bagi keberhasilan puteranya.
10. Bapak Direktur PT. Purina yang banyak meluangkan waktu dan tenaga membantu penulis dalam penelitiannya.

11. Bapak Muhammad Mokodompis beserta keluarga, serta kakak Hastuty Panigoro, Ato Rahman dan Anwar Panigoro sekeluarga.

Akhirnya penulis menyampaikan mudah-mudahan skripsi ini yang sangat sederhana dapat bermanfaat. A m i n.

Ujung Pandang, Nopember 1996



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Beberapa Pengertian Tentang :	14
1. Pengertian Koordinasi	14
2. Pengertian Retribusi	16
B. Proses Perumusan Kebijakan Retri- busi Parkir	18
C. Mekanisme Kerja Pemungutan Retri- busi Parkir	22
BAB III : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	27
A. Keadaan Aparat Pelaksana Pemungutan Retribusi Parkir	27
B. Struktur Organisasi	34

C. Sarana dan Prasarana Parkir	47
D. Keadaan Lokasi Daerah Parkir	51
BAB IV : HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN ...	54
A. Koordinasi Perencanaan Pemungutan Retribusi Parkir	54
B. Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina	63
C. Pengendalian dan Pengawasan	72
D. Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Per- mungutan Retribusi Parkir di Kotamadya Ujung Pandang	78
BAB V : P E N U T U P	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	86

DAFTAR TABEL



TABEL

1	: Keadaan Jumlah Aparat/Karyawan Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan PT. Purina	9
2	: Keadaan Sampel menurut Kelompok	10
3	: Keadaan Aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang menurut Kedudukannya Tahun 1996	28
4	: Keadaan Aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang menurut Pendidikannya Tahun 1996	28
5	: Keadaan Aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang menurut Golongannya Tahun 1996	29
6	: Keadaan Karyawan PT. Purina Ujung Pandang menurut Kedudukannya Tahun 1996	30
7	: Keadaan Karyawan PT. Purina Ujung Pandang menurut Pendidikan Tahun 1996	31
8	: Hasil Pemungutan Retribusi Parkir di Kotamadya Ujung Pandang	33
9	: Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan Pemungutan Retribusi Parkir antara Dipenda Tk. II UP dengan PT. Purina	56
10	: Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Perencanaan Untuk Pencapaian Sasaran dan Tujuan Pengelolaan Perparkiran	58
11	: Tanggapan Responden Mengenai Kelayakan Tempat Parkir terhadap Pemungutan Retribusi Parkir	61
12	: Tanggapan Responden Mengenai Pencapaian Target Yang Dicapai	62
13	: Tanggapan Responden Mengenai Hambatan yang ditemui dalam Pengelolaan Retribusi Parkir	68


14	: Tanggapan Responden Mengenai Kebutuhan PT. Purina akan Dukungan Pemda Tk. II Ujung Pandang	69
15	: Tanggapan Responden Mengenai Pengelolaan Retribusi Parkir Antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT.Purina.....	71
16	: Tanggapan Responden Mengenai Keberadaan Pihak Swasta dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan Perparkiran	74
17	: Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Kemampuan Aparat Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir	76
18	: Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Masyarakat Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir	77
19	: Tanggapan Responden Mengenai Hambatan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Ujung Pandang	78



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH



Telah disadari bahwa dalam era globalisasi dewasa ini pembangunan di segala bidang kian meningkat sejalan dengan semakin besarnya volume kebutuhan masyarakat dalam mengarungi aktivitasnya sehari-hari. Peningkatan sarana transportasi adalah termasuk bagian dari kegiatan pembangunan yang menjadi titik perhatian pemerintah kota, bukan disebabkan oleh kurangnya sarana angkutan atau transportasi akan tetapi yang menjadi perhatian bagi pemerintah adalah hal ini, adalah ketidakseimbangan ruas jalan dengan kuantitas kendaraan yang ada dan situasi seperti ini menimbulkan kesemrawutan di jalan-jalan.

Dalam situasi seperti ini diperlukan peranan pemerintah di dalam menata dan menerbitkan pembangunan jalan bagi pemakai kendaraan dengan menyiapkan sarana dan prasarana parkir guna menghindari kemacetan lalu lintas kendaraan di jalan.

Khususnya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi parkir yang terasa turut menunjang realisasi pelaksanaan pembangunan daerah, karena melalui retribusi parkir pemerintah dapat memperoleh income atau devisa yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Akan tetapi penataan dan penertiban serta sarana alokasi parkir yang nampak di Kotamadya Ujung Pandang ini

masih tergolong kurang sesuai sebagai kota metropolitan di kawasan Indonesia Timur. Kondisi seperti ini sangatlah diharapkan adanya suatu pembaharuan yang mengarah kepada perubahan-perubahan di dalam menata alokasi-alokasi parkir, sehingga pemakai kendaraan merasakan keikhlasan memenuhi pembayaran retribusi parkir yang dikenakan padanya. Untuk menciptakan perubahan terhadap pemungutan retribusi parkir yang dianggap layak maka tidak lain hanya melalui kegiatan koordinasi yang dimulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Meningkatnya kepadatan kendaraan sekarang ini dalam berbagai bentuk dan aktivitasnya, mendorong pula peningkatan hasil pencapaian pemungutan retribusi parkir dengan melakukan berbagai upaya, dan salah satu upaya pemerintah yaitu melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan swasta, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran dalam pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi parkir ke arah pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan. Dasar pemikiran tersebut sangat penting karena semakin berkembangnya kebutuhan akan alokasi parkir, maka akan timbul pula berbagai masalah yang akan dihadapi terutama terhadap kerjasama dengan pihak swastanisasi.

Berdasarkan alasan ini, maka tiada keputusan lain dalam usaha pencapaian sasaran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir kecuali mendasarkan diri pada faktor kondisi dan situasi dengan memperhatikan hasil

riset atau hasil studi kelayakan yang secara administratif dalam mengambil keputusan merupakan proses yang cukup strategis nilainya.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang senantiasa didasarkan pada konsep perencanaan sebagai pola dasar pelaksanaan rencana-rencana yang telah disusun, sangatlah mendasar sifatnya yang justru akan menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dan sedikitnya dapat melancarkan pelaksanaannya. Disinilah peranan koordinasi dalam pelaksanaan rencana pemungutan retribusi parkir dengan pihak swasta, ia merupakan sarana yang ampuh untuk menopang usaha menuju suatu keberhasilan yang diidam-idamkan. Ketertiban dan keamanan yang diharapkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir hanya akan mungkin dapat dicapai melalui implementasi koordinasi secara tepat.

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh pihak swasta yang baik dan lancar sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang tepat berdasarkan berbagai tinjauan dengan mempertimbangkan beberapa aspek pula : seperti penataan akan ketertiban dan keamanan yang dapat dianggap layak bagi pemakai kendaraan disamping pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kondisional, baik yang menyangkut tentang tujuan yang akan dicapai, perubahan-perubahan apa yang mungkin timbul, maupun tentang masalah masalah apa yang mungkin muncul akibat perubahan yang timbul, kesemuanya ini menjadi indikasi penting yang

perlu diperhatikan dalam suatu pelaksanaan koordinasi agar suatu pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan sebaik-baiknya.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir khususnya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang yang telah menjadi sasaran penulis dalam pembahasan skripsi ini, sangatlah dituntut kemampuan dan kejelian dalam pembahasannya. Kemampuan yang dimaksud di sini ialah bagaimana penulis menyampaikan wawasan-wawasan pemikiran yang dapat mengurangi atau memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang dalam pencapaian target hasil pemungutan retribusi parkir. Sedang mengenai kejelian dimaksud ialah penulis dituntut agar fakta atau informasi yang merupakan data-data pelaksanaan pemungutan retribusi parkir baik oleh PT. Purina maupun oleh Kantor Dipenda Tk. II Ujung Pandang, sebelum dibahas ke dalam skripsi ini terlebih dahulu dianalisa mengenai benar tidaknya informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menelusuri dan memahami kenyataan yang terjadi di dalamnya, khususnya menyangkut tentang pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh pihak swasta dengan mengambil sebuah judul :

"PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG".



B. PEMBATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana diketahui bahwa dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah keterlibatan pihak swasta dalam penanganan pemungutan retribusi parkir, sehingga untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengolahan yang didasari pertimbangan-pertimbangan dengan kondisi dan situasi yang ada seperti; proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya serta kemampuan aparat itu sendiri.

Dari uraian tersebut penulis merasa perlu pembatasan dalam pembahasan skripsi ini yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir Kotamadya Ujung Pandang dengan berupaya mencari pemecahannya agar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dapat mencapai tujuan dan sasarnya.

Bertitik tolak pada batasan masalah tersebut di atas, maka adapun masalah yang akan diteliti di sini, adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina dalam pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.
2. Apakah pengelolaan PT. Purina dengan Dipenda Tk. II Ujung Pandang, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya?

3. Apakah yang menghambat pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tk.II Ujung Pandang dengan PT. Purina Ujung Pandang dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir di Ujung Pandang.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana pengelolaan yang mencakup ; Proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengeloan dan pengawasannya yang diterapkan Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan PT. Purina Ujung Pandang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota-madya Ujung Pandang.
- c. Untuk mengetahui pencapaian sasaran dan target pemungutan retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan PT.Purina Ujung Pandang.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan sebagai input dan menjadi bahan pertimbangan dalam memantapkan kemampuan aparat terhadap pengelolaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang

- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan iklim kerjasama yang baik terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.
- c. Diharapkan sebagai kerangka pemikiran dalam penyusunan rencana/program pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang pada masa akan datang.

D. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan skripsi ini oleh penulis menggunakan metode penelitian survey, yang dimaksud metode penelitian survey di sini karena penelitian dilakukan dengan menggunakan daftar questioner dengan interview, dan data diperoleh melalui kelompok-kelompok yang dipilih secara hati-hati, dimana kelompok-kelompok tersebut dijadikan sampling yang dapat mewakili kelompok yang lebih besar.

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode survey memperhatikan pula metode penelitian lainnya, seperti :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan maksud penulis memaparkan data-data yang relevan dengan masalah yang di bahas. Untuk itu penulis mengumpulkan data melalui



beberapa tahap, dan setelah data/informasi tersebut terkumpul ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisa yang diperoleh.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam hal ini adalah seluruh aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan Karyawan PT.Purina Ujung Pandang. Sedang yang dijadikan sampel adalah sebagian dari populasi. Agar dalam penelitian ditemukan generalisasi yang bersifat umum, maka penelitian perlu menarik sampel dengan terlebih dahulu menentukan populasi.

Adapun cara penarikan sampel yang digunakan akan dilakukan dengan teknik "Random Sampling" yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Cara yang ditempuh dalam penentuan sampel di sini dilakukan dengan cara undian, yang terlebih dahulu mengacak kemudian menarik sampel sebanyak yang diperlukan. Agar penentuan suatu sampel tidak meragukan maka peneliti terlebih dahulu menentukan populasi sebagai berikut :

TABEL 1

KEADAAN JUMLAH APARAT/KARYAWAN DIPENDA TK. II
DAN PT. PURINA UJUNG PANDANG

No.	Unit - Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Dipenda Tk. II UP	105	49	154
2.	PT. Purina UP	321	9	330
: J u m l a h		426	58	484

Sumber Data : Kantor Dipenda Tk. II Ujung Pandang, Dan
PT. Purina Ujung Pandang, 1996.

Karena besarnya jumlah populasi yang ada, maka agar sampel sedapat mungkin reirensentatif terhadap populasi, penulis menggunakan pendpat sebagai berikut :

"Bila populasi cukup homogen terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50 % dan di atas 100 sebesar 15%. Untuk menjamin ada baiknya sampel selalu ditambah sedikit lagi jumlah matematis tadi" (Winarno Surachmad, 1978 : 91).

Oleh karena populasi penelitian berjumlah 484 orang ($484 > 100$), maka ditetapkan sampel 15%. Dengan demikian sampel ditetapkan seperti di bawah ini :

$$\frac{484}{100} \times 15 \% = 72,6 \text{ atau } 73$$

Untuk menarik sampel dari jumlah kelompok populasi tersebut, ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$N = \frac{n_{wk}}{P} \times S$$



Keterangan :

n_{wk} = Jumlah aparat/karyawan berdasarkan kelompok unitnya.

P = Jumlah aparat/karyawan secara keseluruhan.

S = Sampel Total (15% dari populasi = 73)

Dengan demikian dapat ditetapkan sampel setiap kelompok seperti di bawah ini :

a. $N = \frac{154}{484} \times 73 = 23,2$ atau 23 orang

b. $N = \frac{330}{484} \times 73 = 49,7$ atau 50 orang

Dari hasil rumusan tersebut di atas, diperoleh sampel dari masing-masing kelompok, yaitu :

TABEL 2
KEADAAN SAMPEL MENURUT KELOMPOK

No. ;	Unit - Unit ;	Populasi ;	Sampel
1. ;	Dipenda Tk. II UP ;	154 ;	23
2. ;	PT. Purina UP ;	330 ;	50
; J u m l a h ;		484 ;	73

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Agustus 1996



3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan secara langsung mengadakan pengamatan di lapangan tentang masalah yang sehubungan dengan pembahasan.

b. Interview (Wawancara)

Pengumpulan data di sini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden yang dianggap dapat memberikan data-data serta informasi yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi penulis. Dalam pengumpulan data di sini penulis menggunakan pula daftar pertanyaan atau questioner.

4. Teknik Analisa

Setelah data dari hasil angket telah terkumpul, maka data tersebut kemudian dikuantitatifkan dengan memberi bobot masing-masing jawaban dengan nilai 1 (satu) dari setiap indikator pertanyaan (angket). Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur sejauhmana hasil angket yang diperoleh penulis merumuskan sebagai berikut :

$$\frac{Na}{S} \times 100 \%$$

Keterangan : Na = Jumlah jawaban informan dari setiap pertanyaan yang telah disiapkan (angket).

S = Jumlah sampel total (15 % dari populasi = 73 orang).

Dari hasil rumusan yang diperoleh melalui angket tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil data dan informasi yang diperoleh melalui observasi guna mendapatkan gambaran tentang sejauhmana pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir melalui PT. Purina Kotamadya Ujung Pandang.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini jelas bagi setiap pembaca, maka penulis mengemukakan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB PERTAMA : Diuraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistimatika penulisan.

BAB KEDUA : Dalam pembahasan ini diuraikan tentang tinjauan pustaka mengenai beberapa pengertian tentang koordinasi dan pengertian retribusi, proses kebijaksanaan retribusi parkir, struktur organisasi pemungutan retribusi parkir antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina.

BAB KETIGA : Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum daerah penelitian yang terdiri dari keadaan aparat pelaksana pemungutan retribusi parkir baik dari Dipenda Tk. II Ujung Pandang maupun dari PT. Purina, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana parkir, serta lokasi daerah parkir.

BAB KEEMPAT : Dalam bab ini merupakan inti pembahasan yaitu mengenai pengumpulan data yang meliputi ; pengelolaan rencana pemungutan retribusi parkir, pemungutan pelaksanaan retribusi parkir, pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi parkir, serta hambatan-hambatannya.

BAB KELIMA : Sebagai kelengkapan pembahasan skripsi ini, diuraikan pula kesimpulan dan saran-saran mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BEBERAPA PENGERTIAN

Dalam pembahasan skripsi atau suatu karya ilmiah untuk memecahkan suatu masalah perlu landasan teoritis sebagai landasan berfikir, olehnya itu pembahasan skripsi ini diuraikan beberapa pengertian tentang :

1. Pengertian Koordinasi

Secara sederhana koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha dari beberapa atau kelompok yang berupaya secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Geoge R. Terry (1988 : 113) koordinasi adalah :

"Suatu usaha yang sinkron/teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan". (disadur oleh Achmad Umar "Pengantar Administrasi & Management").

Sedang Bintoro Tjokroamidjojo (1988 : 199) mengemukakan bahwa koordinasi dalam pemerintahan dapat dirumuskan sebagai : "Suatu fungsi aparatur pemerintahan untuk memadukan (Mengintegrasikan) serta menyerasikan dan menyelaraskan sebagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai".

Melalui pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa koordinasi adalah suatu kemampuan menata hubungan kerja sama dalam pencapaian tujuan.

Pendapat lain mengenai pengertian koordinasi, A.W. Widjaya mengemukakan (1987 : 28) Koordinasi merupakan hubungan kerja sama team work yang baik. Team dan kerja sama yang baik akan mencapai sasaran yang baik pula.

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas, diperoleh temuan-temuan bahwa koordinasi merupakan salah satu aspek dari bimbingan yang bertujuan mencapai dan menjamin keharmonisan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan di dalam rangka kerjasama. Koordinasi bersifat vertikal dan bersifat horizontal, koordinasi bersifat vertikal adalah keterpaduan (integrasi) sedang koordinasi bersifat horizontal adalah sejajar dan setaraf, dari kedua sifatnya inilah koordinasi patut diperhatikan terutama bagi seseorang yang memiliki fungsi sebagai administrator, organisasi dan manajer.

Salah satu aliran yang dianggap dapat membantu dalam pencapaian tujuan pelaksanaan koordinasi adalah dengan mengandalkan aliran sistem yang memandang suatu organisasi sebagai tatanan yang kompleks dan dinamis dari unsur-unsur yang saling terikat, yakni semua unit-unit terlibat dipandang sebagai unsur-unsur input, proses, output, saluran feedback, dan lingkung-

an tempat unsur-unsur tersebut beroperasi. Anggapan dari aliran sistem ini ialah mengemukakan bahwa suatu perubahan dalam satu unsur, akan mengakibatkan perubahan pada unsur yang lain. Keterjalinan dan keterikatan tersebut cenderung menjadi kompleks dinamis, dan seringkali tidak diketahui. Oleh karenanya ketika pimpinan Unit-unit membuat keputusan yang hanya melibatkan satu unsur saja tidak disadari akan memberikan pengaruh pada seluruh unsur dalam organisasi tersebut. Oleh karenanya suatu organisasi dapat dianggap sebagai multidimensi dan asumsinya mengenai hubungan sebab akibat dalam organisasi, sebagai proses interaksi yang dinamis diantara unsur-unsur organisasi merupakan sistem yang adaptive dan jika berkemauan untuk hidup maka harus mau menyesuaikan dengan perubahan yang ada dalam lingkungan, sebagai pengertian umum koordinasi yaitu kemampuan menata hubungan kerjasama dalam pencapaian tujuan.

2. Pengertian Retribusi

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar artinya untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dan kepada penduduk tertentu dikenakan beban pemungutan retribusi. Oleh karena itu pemungutan retribusi perlu diatur berdasarkan pemungutan retribusi daerah yang ada pada tingkat daerah yang diatur dalam Peraturan

Daerah (PERDA) yang telah mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pihak berwenang.

Retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan kepada negara atau daerah dan pembayaran itu mendapat prestasi kembali atau jasa timbal yang tidak langsung dari pemerintah, misalnya retribusi pasar, terminal bis, tempat parkir dan sebagainya.

Retribusi sebagai sumber pendapatan negara ataupun daerah menurut Rachmat Soemitro (1957 : 15) "Retribusi ialah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara"

Sedang menurut W.J.S. Poewadarminta (1984 : 822) Retribusi ialah "Pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang oleh pemerintah (kotapraja) sebagai balas jasa.

Melalui pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa retribusi merupakan pungutan negara atau daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan yang diberikan oleh negara atau daerah atau adanya imbalan langsung kepada pembayar, dan dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal, retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

B. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR

Keberadaan pungutan retribusi parkir, dilandasi oleh pungutan retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang merupakan ketentuan dan pedoman daerah untuk mengelola dan memungut retribusi daerah termasuk pemungutan retribusi parkir.

Dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan retribusi daerah seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1), sebagai berikut :

"Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atas milik daerah, bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah". (1957 : 15).

Jadi retribusi daerah diberikan pembatasan besarnya pungutan yang dilakukan oleh daerah dan tidak boleh terlalu tinggi guna menjamin suatu keuntungan yang layak bagi suatu daerah, artinya pelaksanaannya bersifat ekonomis dan merupakan pungutan yang pada umumnya sifat budgetairnya tidak menonjol.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, dan dengan sejalan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat erat sekarang ini, kebijakan-kebijakan semakin dibutuhkan pula guna menciptakan ketertiban di dalam berlalu lintas yang semakin tahun semakin padat, maka pemerintah daerah merumuskan suatu kebijakan dalam mengatur dan me-

nertibkan para pengendara kendaraan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 dan pada Tanggal 27 Oktober 1994 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Ujung Pandang Nomor 567/5/KEP/551.21/94, tentang ketentuan perparkiran yang rumusannya sebagai berikut :

"Pasal (1) ; Tempat parkir ialah tempat memarkir kendaraan untuk sementara dengan menggunakan jalan, peralatan parkir, lingkungan parkir, gedung parkir yang ditentukan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir".

"Pasal (12) ; Setiap pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya disuatu tempat parkir/gedung parkir/ peralatan parkir wajib membayar retribusi atau sewa parkir serta mematuhi semua rambu-rambu untuk tanda lain / petunjuk yang terpasang yang diberikan".

"Pasal (16) ; Pengelolaan gedung parkir dan peralatan parkir swasta yang memungut sewa diwajibkan membayar setoran kepada Pemerintah Daerah sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal karcis yang bersangkutan. Dan kepada pemilik kendaraan dimaksud diktum kedua dikenakan retribusi :


Bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih sebesar Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) setiap bulan. Dan bagi kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap bulan".

Bertitik tolak pada Peraturan Daerah tersebut di atas, maka retribusi daerah termasuk retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dalam membiayai urusan rumah tangga daerah, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara intensif dengan maksud agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sangat ditunjang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dimana dalam penjelasan umum tentang keuangan daerah dinyatakan sebagai berikut :

"Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semuanya sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kewenangan ini dapat berarti bahwa daerah berkesempatan meningkatkan pendapatan daerahnya dari sumber yang telah ada, demikian pula berpeluang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari segi obyek atau subyek suatu pungutan yang sudah ada maupun perluasan jenis obyek suatu sumber pendapatan yang telah berlaku.



Dalam kaitannya antara pemungutan retribusi parkir dengan peningkatan pendapatan daerah sangat erat, dimana keberadaan retribusi parkir bertujuan sebagai peningkatan dan perluasan pendapatan daerah agar penyelenggaraan pembangunan dapat semakin berkembang dan meningkat.

Keberhasilan pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh pemerintah saja, tetapi keikutsertaan masyarakat di dalamnya sangat menentukan. Oleh karena itu salah satu fungsi lain dari pemerintah adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dalam memenuhi kewajibannya dengan sukarela membayar pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya untuk kepentingan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian peranan pajak daerah dan retribusi menjadi sangat penting dan menentukan peningkatan pembangunan daerah, karena pungutan tersebut merupakan sumber pokok bagi daerah namun yang perlu pula diperhatikan pemerintah mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pemungutan retribusi tersebut dengan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam partisipasi masyarakat melaksanakan pembangunan.

C. MEKANISME KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TER-

HADAP PT. PURINA

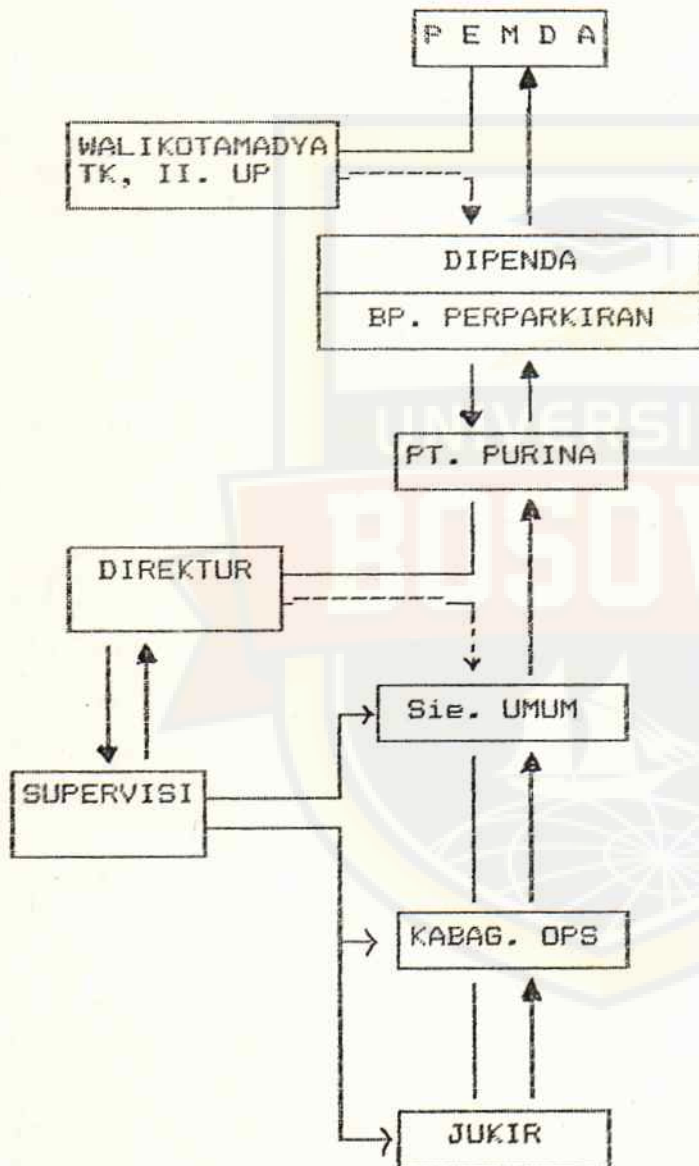
Mekanisme koordinasi pada proses pengusulan program atau rencana pemungutan retribusi parkir oleh PT. Purina yaitu dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kotamadya Ujung Pandang, yang secara operasional menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan PT. Purina Ujung Pandang maka demikian pula dalam struktur pengelolaan pemungutan retribusi parkir melibatkan Dinas-Dinas Daerah dengan Unit-unit kerja PT. Purina secara operasional dimulai dari tingkat bawah, sebagai berikut :

- a. Jukir (Juru Parkir)
- b. Bagian Operasional
- c. Seksi Umum
- d. Supervisi
- e. Direksi sebagai pimpinan Perusahaan
- f. Pemda Tingkat II Ujung Pandang melalui Dinas-Dinas Daerah yang bersangkutan (Dipenda dan Sie Retribusi)

Di samping tingkat pemerintah yang terlibat, maka peran serta masyarakat tidak lepas pula dari orientasi kelancaran dan peningkatan pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pembangunan daerah dengan memanfaatkan

hasil pendapatan daerah utamanya masalah pembiayaan pembangunan, untuk jelasnya mengenai struktur koordinasi pemungutan retribusi parkir, dapat dilihat sebagai berikut :

MEKANISME KERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR



Keterangan :

- > : Garis Bimbingan
- > : Garis Arus Laporan
- > : Garis Pengawasan

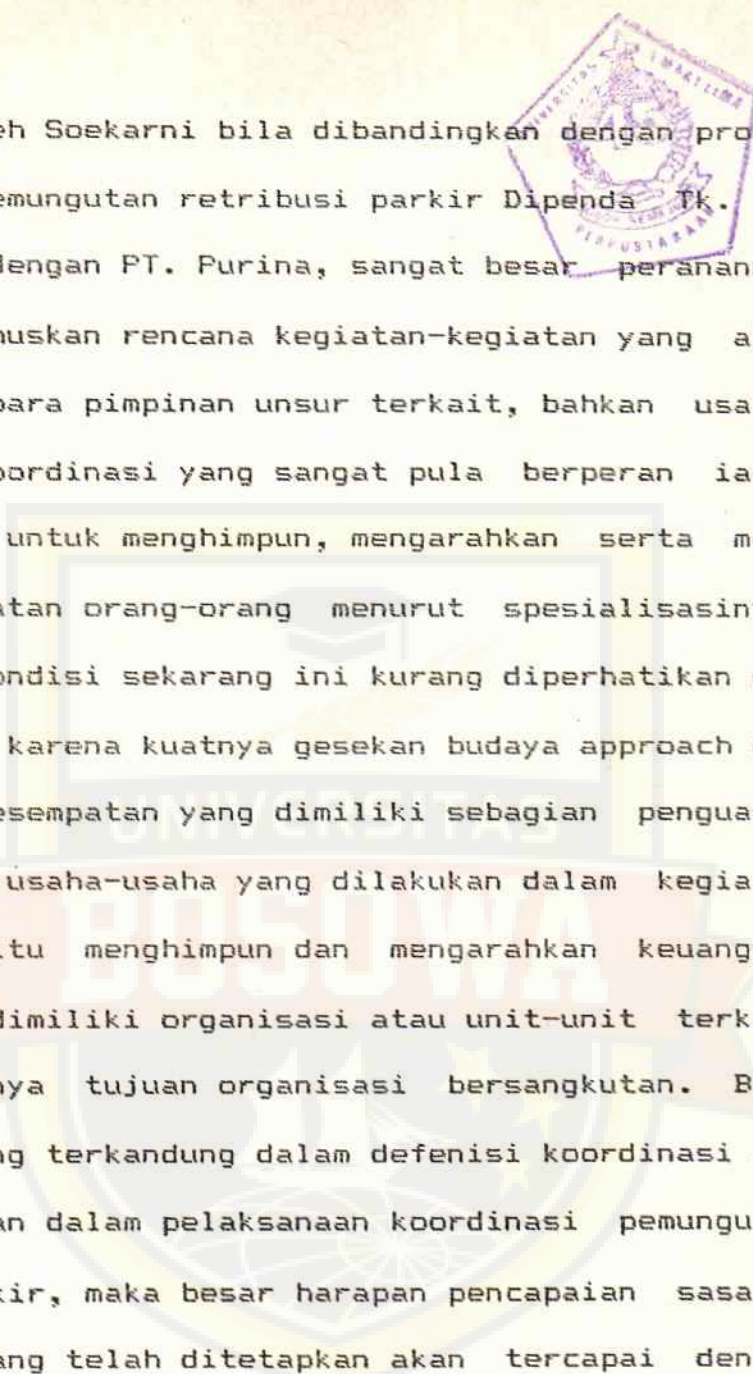
Melihat bagan struktur pengelolaan pemungutan retribusi parkir (hal. 23), maka koordiansi sangat penting dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, karena mencakup semua usaha kegiatan penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian usaha yang dilaksanakan.

Dari uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa koordinasi dalam usaha pelaksanaannya perlu suatu pemikiran yang rasional dari berbagai unsur terkait untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan.

Sebagaimana Soekarni K. (1988 : 114) dalam buku Pengantar Administrasi dan Management Saduran Achmad Umar, mengemukakan koordinasi adalah :

"Usaha-usaha/kegiatan-kegiatan tiap pejabat pimpinan dalam setiap tingkatan hierarchi untuk menghimpun/mengarahkan/menjuruskan kegiatan orang-orang (para spesialis), uang, material (bahan-bahan), metode-metode, mesin-mesin serta sumber lainnya yang ada pada organisasi demi tercapainya tujuan dari pada organisasi itu.

Dengan usaha-usaha sesuai defenisi tersebut dapatlah diartikan bahwa kegiatan pengelolaan perumusannya perlu pertimbangan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun sosial secara menyeluruh, seperti halnya dalam penyusunan suatu rencana, program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendaliannya sebagai bagian dari proses kegiatan pengelolaan pemungutan retribusi parkir. Berdasarkan usaha-usaha dalam kegiatan koordinasi yang



dikemukakan oleh Soekarni bila dibandingkan dengan proses pengelolaan pemungutan retribusi parkir Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina, sangat besar peranannya di dalam merumuskan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan para pimpinan unsur terkait, bahkan usaha-usaha dalam koordinasi yang sangat pula berperan ialah adanya usaha untuk menghimpun, mengarahkan serta men-juruskan kegiatan orang-orang menurut spesialisasinya, dimana dalam kondisi sekarang ini kurang diperhatikan dan diperhitungkan karena kuatnya gesekan budaya approach dan pemanfaatan kesempatan yang dimiliki sebagian penguasa. Demikian pula usaha-usaha yang dilakukan dalam kegiatan koordinasi yaitu menghimpun dan mengarahkan keuangan, material yang dimiliki organisasi atau unit-unit terkait demi tercapainya tujuan organisasi bersangkutan. Bila usaha-usaha yang terkandung dalam defenisi koordinasi ini dapat dirumuskan dalam pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi parkir, maka besar harapan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan akan tercapai dengan baik.

Usaha-usaha yang dimaksudkan dalam kegiatan pengelolaan dapat dikatakan demikian karena bila melihat mekanisme kerja pemungutan retribusi parkir antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina, yaitu dilakukan dengan melibatkan mulai dari satuan unsur pengelolah/ perusahaan

perusahaan yang paling bawah mengumpulkan data informasi kemudian diusulkan ke tingkat atas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan program-program yang akan dilakukan, agar program dapat diterima oleh satuan kerja, serta masyarakat sendiri.



BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Obyek penelitian yang diambil penulis adalah pada wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yaitu pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Ujung Pandang dan pada Perusahaan Swasta (PT. PURINA) Ujung Pandang. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang daerah penelitian dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

A. KEADAAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Aparat (Pegawai dan karyawan) adalah pelaksana tugas pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan pada PT. Purina dari segi fisiknya maupun dari segi materilnya, dalam hal ini aparat adalah manusia biasa yang mempunyai keterbatasan fikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dengan keterbatasan yang dimilikinya agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berhasilguna dan tepatguna tantu diperlukan usaha-usaha peningkatan kemampuan khususnya dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu pendapatan asli daerah Kotamadya Ujung Pandang.

Adapun keadaan aparat/karyawan pelaksana struktur koordinasi pemungutan retribusi parkir dalam hal ini aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan karyawan PT. Purina Ujung Pandang adalah sebagai berikut :

TABEL 3

KEADAAN APARAT DIPENDA TK. II. UJUNG PANDANG
MENURUT KEDUDUKANNYA
TAHUN 1996

No	Kedudukan	A p a r a t		jumlah
		L	P	
1.	Tata Usaha	25	15	40
2.	Perencanaan & Pengendalian	18	2	20
3.	Penagihan	21	4	25
4.	Pendaftaran/Pendataan	16	7	23
5.	Penetapan	14	9	23
6.	Pembukuan, Pelaporan	12	12	24
J u m l a h		106	49	155

Sumber data : Kantor Dipenda Tk. II Ujung Pandang, 1996

TABEL 4

KEADAAN APARAT DIPENDA TK. II UJUNG PANDANG
MENURUT PENDIDIKANNYA
TAHUN 1996

No	Pendidikan	A p a r a t
1.	Sarjana S.1	33 orang
2.	Sarjana Muda	18 orang
3.	S M A	54 orang
4.	S M P	45 orang
5.	S D	5 orang
J u m l a h		155 orang

Sumber data : Kantor Dipenda Tk. II Ujung
Pandang, 1996

TABEL 5

KEADAAN APARAT DIPENDA TK. II UJUNG PANDANG
MENURUT GOLONGANNYA
TAHUN 1996

No	Golongan	Aparat
1.	IV	1 orang
2.	III	62 orang
3.	II	70 orang
4.	I	22 orang
: J u m l a h		: 155 orang

Sumber data : Kantor Dipenda Tk. II Ujung
Pandang, 1996

Selain keadaan aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang, penulis dapat pula menggambarkan keadaan Karyawan PT. Purina Ujung Pandang menurut kedudukan dan pendidikannya, sebagai berikut :



TABEL 6

KEADAAN KARYAWAN PT. PURINA UJUG PANDANG
MENURUT KEDUDUKANNYA
TAHUN 1996

No.	Kedudukan		Karyawan
1.	Direksi		3 orang
2.	Supervisi		3 orang
3.	Kabag. Operasional		1 orang
4.	Sekretaris		1 orang
5.	Sie. Umum		2 orang
6.	Kordin. Sticker		7 orang
7.	Insidentil		4 orang
8.	Pembukuan		1 orang
9.	Bendahara		2 orang
10.	Keamanan		5 orang
11.	Office Boy		1 orang
12.	Juru Parkir		300 orang
: J u m l a h			: 330 orang

Sumber data : Kantor PT. Purina Ujung Pandang
1996.

TABEL 7

KEADAAN KARYAWAN PT. PURINA UJUNG PANDANG
MENURUT PENDIDIKANNYA
TAHUN 1996

No	Pendidikan	Karyawan
1.	Sarjana (S.1)	7 orang
2.	Sarmud/Diploma	4 orang
3.	S L T A	19 orang
4.	S L T P	96 orang
5.	S D	123 orang
6.	Tidak tamat SD	81 orang
; J u m l a h		330 orang

Sumber data : Kantor PT. Purina Ujung
Pandang, 1996.

Dari gambaran aparat baik pegawai Dipenda Tk. II Ujung Pandang maupun karyawan PT. Purina Ujung Pandang pada kenyataannya cukup besar, akan tetapi menurut realisasi aparat Dipenda Tk. II Ujung Pandang yang terlibat langsung dalam pengelolaan perparkiran hanya 5 (lima) orang dari 155 orang personilnya. Kelima personil inilah yang diberi wewenang oleh Dipenda untuk menangani salah satu unit yaitu Badan Pengelola Perkiraan sekaligus sebagai pendamping PT. Purina Ujung Pandang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang.

Sementara di pihak PT. Purina telah memiliki tenaga Karyawan sebanyak 330 orang, walaupun sebagian besar adalah tenaga juru parkir (Jukir).

Dilihat kedudukan aparat antara aparat Dipenda TK.II Ujung Pandang dengan PT. Purina, di pihak Dipenda Tk. II Ujung Pandang nampak merata di setiap unit, sedang di pihak PT. Purina terjadi perbedaan yang cukup menjolok personal setiap unit-unitnya. Dari segi pendidikan aparat keduanya memiliki perbandingan tingkat pendidikan personil yang cukup berbeda mulai dari tingkat Sarjana, SLTA, SLTP, dan tamatan SD. Terjadinya perbedaan tingkat pendidikan aparat di sini disebabkan oleh berbagai aspek yang menunjang karier para pegawai/karyawan, seperti kemampuan, masa kerja, dan kesempatan pegawai/karyawan mengecap pendidikan itu sendiri.

Salah satu pertimbangan yang memerlukan pemikiran bagi PT.Purina sebagai perusahaan yang mengelolah pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang, adalah besarnya jumlah tenaga pekerja/ karyawan yang dimilikinya belumlah menjadi jaminan dalam pencapaian target yang ditetapkannya, hal ini nampak pada data dan informasi yang diperoleh dimana realisasi dalam pencapaian target yang telah ditentukan belum dicapai sesuai yang diharapkan, bahkan masih tergolong minim bila dilihat perbandingan antara target yang ditetapkan dengan

realisasi yang diperoleh selama lebih kurang tiga tahun mengelolah retribusi parkir. Untuk jelasnya mengenai pencapaian target dan realisasi pemungutan retribusi parkir Kotamadya Ujung Pandang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 8

HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

: Tahun : Anggaran :	: Pemungutan Retribusi		: Persen- : tase :
	: Target	: Realisasi	
1. : 1994 / 1995	: 400.000.000	: 281.232.400	: 70 %
2. : 1994 / 1995	: 400.000.000	: 300.000.000	: 75 %
3. : 1996 / 1997	: 475.000.000	: 117.222.800	: 25 %
:(sampai Agust. : 1996)	:	:	:
: J u m l a h	: 1.275.000.000	: 698.454.800	: 55 %

Sumber data : Kantor Badan Pengelolah Perkiraan (BPP)
Ujung Pandang, 1996.

Melalui hasil dari tabel tersebut di atas (tabel 8), dapatlah dikemukakan bahwa pengelolaan pemungutan retribusi parkir, bila ingin mencapai target yang diharapkan, perlu peningkatan dari berbagai aspek, baik dari kemampuan pengelolah, sarana dan prasarana tempat parkir maupun aspek lainnya yang dianggap dapat mendukung pencapaian target dan sasaran Dipenda Tk. II Ujung Pandang dalam pemungutan retribusi parkir, disamping untuk

meningkatkan hasil pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah yang sementara berjalan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pemerintah daerah adalah mencakup segala sektor dalam suatu wilayah tertentu, oleh sebab itu mempunyai hubungan yang erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Demikian pula pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang tak lepas dari kegiatan aparat pemerintah dalam unit-unit pemerintahan, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar diperlukan suatu tatanan atau susunan serta struktur organisasi yang rapi, sehingga tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai.

The Liang gie (1980 : 70) mengemukakan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

"Struktur organisasi adalah hubungan diantara karyawan-karyawan dan aktifa-aktifa mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan, dimana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, atau fungsi fungsi dan masing-masing anggota kelompok pegawai yang melaksanakan".

Dari defenisi tersebut memberikan gambaran bahwa struktur organisasi nampak adanya hubungan diantara bidang kerja serta hubungan kerja antara orang-orang, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam membina hubungan kerja.

Dalam kaitan defenisi tersebut di atas dalam hubungannya dengan struktur organisasi Badan Pengelolah Perkiraan baik dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Tingkat II Ujung Pandang, maupun dari pihak swasta PT. Purina Ujung pandang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi Badan Pengelolah Perkiraan Dipenda Tk. II Ujung Pandang

Susunan organisasi pengelolah perkiraan Dipenda Tk. II Ujung Pandang, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab dalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
- b. Badan Pembinaan, terdiri atas ;
 1. Ketua yaitu Sekretaris Daerah
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang.
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Orta Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
 4. Anggota :
 - Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
 - Kepala Badan Pengelolah
 - DAN SAT LANTAS Polrestabes Ujung Pandang
 - Kepala LLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

- Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

c. Badan Pengelolah, terdiri atas :

1. Pimpinan : - Kepala badab Pengelolah
 - Wakil Kepala Badan Pengelola Bidang Operasi.
 - Wakil Kepala Badan pengelola Bidan Administrasi dan Keuangan

2. S t a f : - Staf Teknis;
 - a. Urusan Penelitian dan Pembangunan
 - b. Urusan Pengelolaan Parkir
 - c. Urusan Pengawasan Usaha dan ke-
tertiban Perparkiran
 - Staf Administrasi ;
 - a. Bagian Administrasi Umum dan ke-
pegawaian
 - b. Bagian Pendapatan, anggran dan
Pembukuan.

d. Pelaksana adalah Unit-Unit Parkir yang dibentuk pada tempat-tempat tertentu.

Adapun pembagian tugasnya masing-masing, dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Badan Pembina bertugas :

1. Membina dan mengarahkan kegiatan Badan Pengelolah Perparkiran.

2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perizinan usaha perparkiran, pembinaan dan pembangunan perparkiran.
- c. Meminta atau menampung laporan atas kegiatan Badan Pengelola perparkiran.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

b. Kepala Badan Pengelola bertugas :

1. Memimpin, membina dan mengembangkan sesuai kegiatan pengelolaan perparkiran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelola Perparkiran.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
3. Bilamana Kepala Badan Pengelola berhalangan maka para Wakil-Wakil kepala bertugas mewakili sesuai dengan tugas masing-masing.

c. Bidang Operasi bertugas :

1. Membantu Kepala Badan Pengelola dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang meliputi :
 - Pengelolaan parkir pada Unit-Unit Parkir.
 - Pengawasan Usaha-usaha Parkir.
 - Ketertiban Perparkiran.
 - Penelitian dan Pengembangan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

d. Bidang Administrasi bertugas :

1. Membantu Kepala Badan Pengelolah dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang meliputi:

- Administarsi umum
- Keuangan
- Logistik
- Penyediaan Tanda Retribusi Parkir
- Kepegawaian
- Pembukuan, dan
- Lain-lain di bidang administrasi.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

e. Urusan Penelitian dan Pengembangan bertugas :

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan perparkiran.
2. Menyusun rencana kerja/program kerja umum pembangunan kegiatan perparkiran.
3. Membuat petunjuk dan mengarahkan pelaksanaan rencana dan program kerja umum Badan pengelolah Perparkiran.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Bidang Operasi.

f. Urusan Pengelolaan Parkir bertugas :

1. Melakukan penelitian kapasitas peralatan parkir.
2. Menyusun program kerja pengelolaan parkir.
3. Menerima dan mengelola laporan teknis pengelolaan parkir dari unit-unit parkir untuk diteruskan kepada pimpinan.
4. Menyusun dan menyajikan statistik data peralatan parkir.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Bidang Operasi.

g. Urusan Pengawasan Usaha dan Ketertiban Perparkiran bertugas :

1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan usaha parkir.
2. Melakukan kegiatan pengawasan usaha perkiraan dan terhadap kegiatan pengelolaan unit-unit Parkir.
3. Mengajukan usul kepada pimpinan mengenai pengenaan sanksi/penindakan terhadap usaha-usaha perparkiran dan petugas parkir yang melakukan pelanggaran.
4. Menilai keadaan fisi/fasilitas tempat-tempat parkir yang disediakan oleh usaha perparkiran.



5. Melakukan pengamatan kegiatan kebersihan dan ketertiban tempat-tempat parkir pada unit-unit parkir.

6. Bekerjasama dengan instansi lain melakukan tindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran parkir atau kegiatan juru parkir tidak resmi.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Bidang Operasi.

h. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, bertugas :

1. Menerima dan menyiapkan serta menyelesaikan semua surat-surat kedinasan baik yang berhubungan dengan kegiatan rutin, maupun kegiatan lainnya, serta tata usaha kepegawaian.

2. Menerima, menyiapkan dan menyelesaikan pembuatan laporan kedinasan yang diperlukan.

3. Mengurus dan menyiapkan surat-surat kedinasan.

4. Mengurus dan menyelenggarakan rapat-rapat, upacara dan mengawasi penggunaan telepon, listrik dan lain-lain yang berhubungan dengan tugas ke rumah tangga.

5. Mengatur dan mengawasi tata tertib dan disiplin karyawan kebersihan kantor dan halaman.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Bidang Administrasi Keuangan.

i. Bagian Pendapatan, Anggaran dan pembukuan bertugas :

1. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan uang dari harga pembayaran retribusi karcis parkir dan uang pendapatan lainnya dan melakukan pembayaran uang untuk keperluan kedinasan.
2. Melakukan penyetoran uang pendapatan pada Kas Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang / Bank yang ditunjuk.
3. menyelenggarakan administrasi dan stock opname kas.
4. Melaksanakan penyediaan dan pembagian/distribusi tanda retribusi parkir dan langganan parkir.
5. Menyusun rencana anggaran keuangan, kebutuhan rutin dan pembangunan.
6. Membina dan mengawasi sistem keuangan/Unit-Unit Parkir.
7. Membuat laporan administrasi keuangan/penerimaan dan pengeluaran rutin.
8. Membuat neraca dan laporan tahunan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan.

j. Unit-Unit Parkir mempunyai tugas :

1. Mengelolah Kegiatan pelayanan parkir.
2. Melakukan pengendalian dan penertiban pelayanan parkir kendaraan.
3. Mengumpulkan dan menyetorkan pungutan-pungutan retribusi parkir kendaraan menurut yang ditentukan.
4. Melakukan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan pengelolaan parkir yang ditugaskan oleh pimpinan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola.

Pada Unit-Unit Parkir ini, terbagi lagi atas :

1. Seksi Pemeriksaan/Pengamat Parkir dengan tugas :
 - a. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengamatan atas juru parkir dan turut mengatur kendaraan bermotor yang masuk/ke luar tempat parkir.
 - b. Memeriksa pengumpulan pertinggal karcis-karcis parkir yang telah digunakan.
 - c. Melakukan pemantauan/pengamatan atas jumlah dan jenis kendaraan yang masuk ke tempat parkir.
 - e. Melakukan kegiatan penjagaan atas peralatan parkir.
 - f. Membantu juru parkir mengawasi kendaraan bermotor selama diparkir dan melarang juru parkir liar yang ada di unit parkir.

g. Melakukan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan pengelolaan parkir yang ditugaskan oleh pimpinan/kepala Unit.

2. Seksi Retribusi / Keuangan, dengan tugas :

a. Menyelenggarakan kegiatan keuangan, tanda retribusi parkir dan kebutuhan lainnya di unit parkir yang bersangkutan termasuk administrasi pembukuannya.

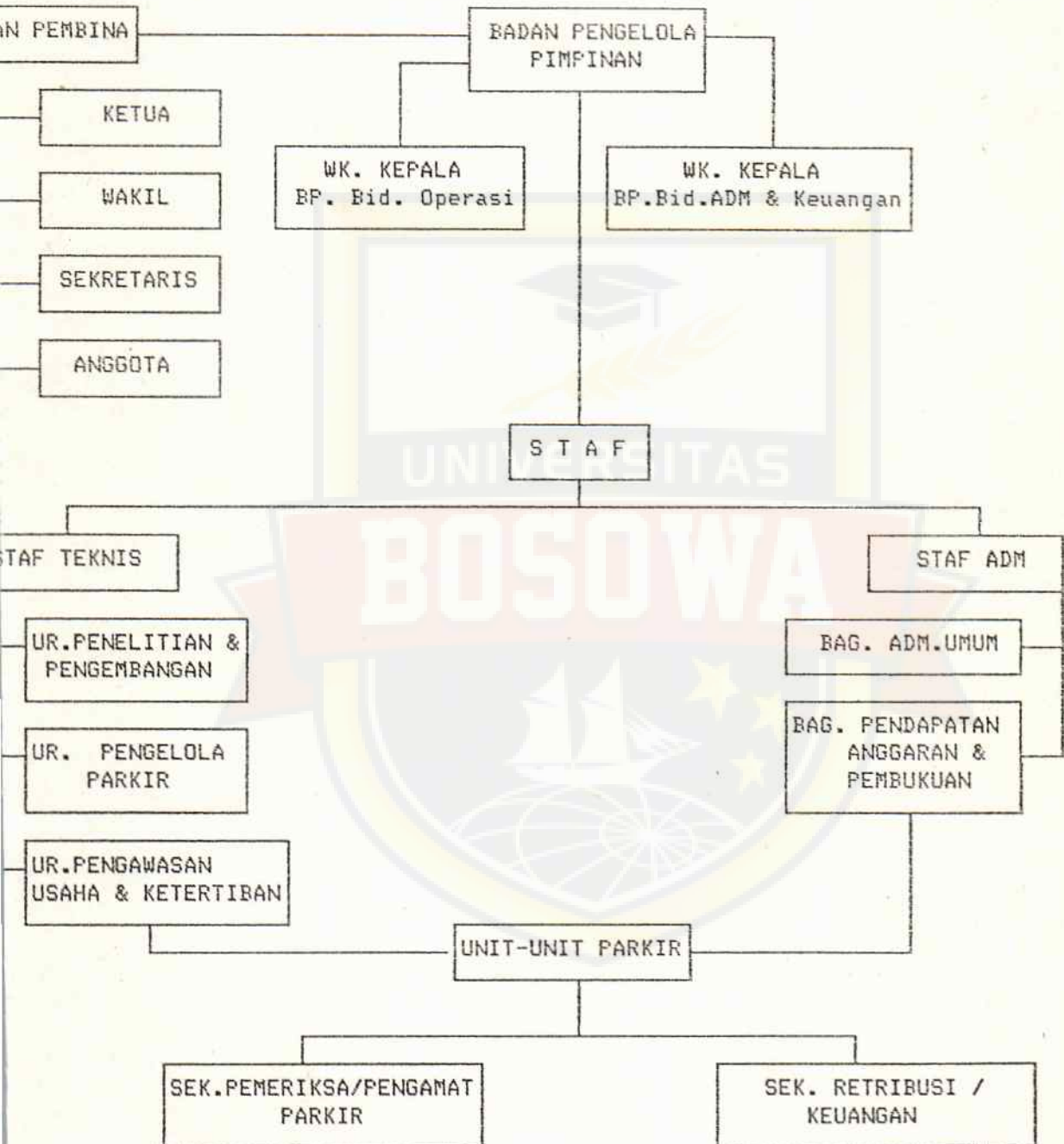
b. Melaporkan hasil pungutan retribusi secara rutin harian kepada Kepala Unit Parkir masing-masing.

3. Tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Badan Pengelola Perparkiran oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Ujung Pandang, dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi halaman berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLA PERPARKIRAN DIPENDA TK. II U.P





2. Struktur Organisasi PT. Purina Ujung Pandang

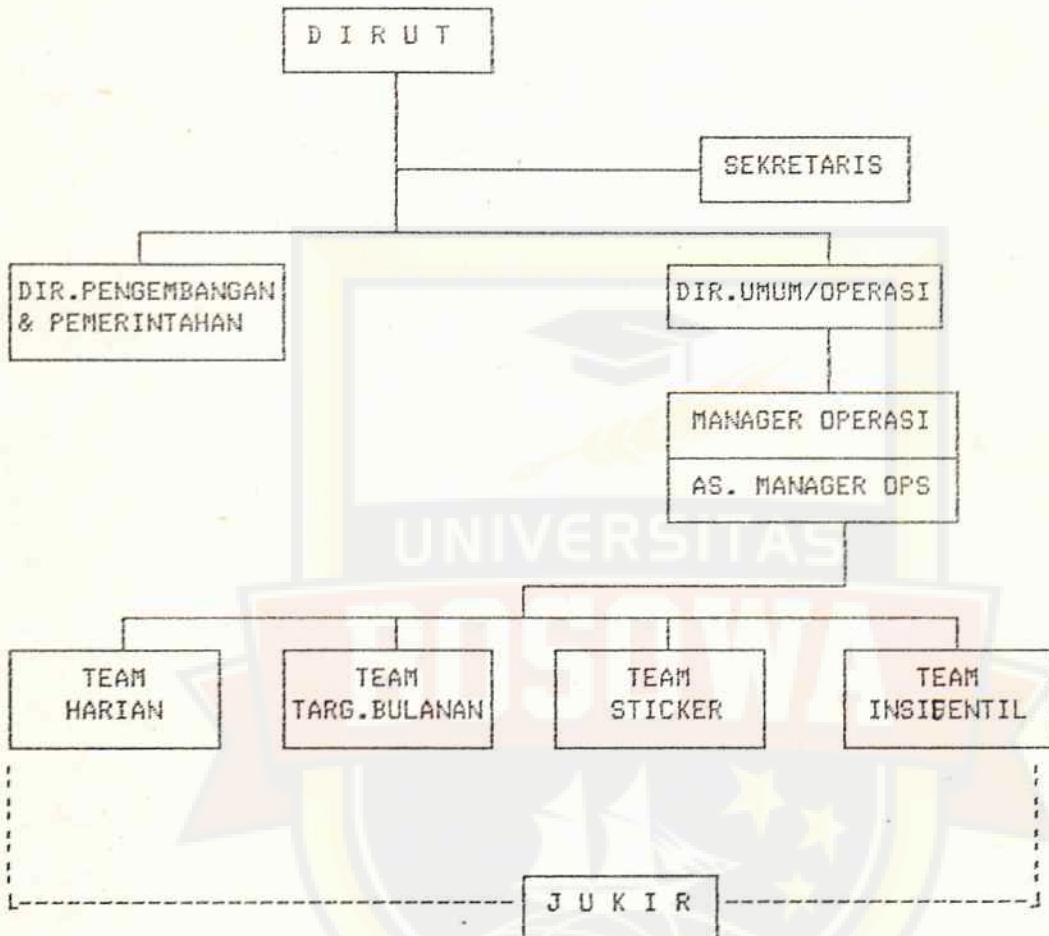
Susunan organisasi PT. Purina Ujung Pandang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut :

- a. Direktur Utama sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan perusahaan.
- b. Sekretaris yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan kerja Direktur Utama, baik dalam menyusun maupun dalam menampung arsip-arsip dan administrasi kegiatan usaha perusahaan.
- c. Direktur Utama dalam melaksanakan kerja perusahaan dibantu oleh dua Direksi yaitu Direksi Pembangunan dan pemerintahan serta Direksi Umum/Operasi, yang bekerja sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. Di samping dua direksi, juga memiliki Manager Operasi dan seorang Asisten Operasi Manager, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan parkir para team-team, mengawasi pelaksanaan parkir para team maupun para Jukir, menjaga ketertiban lokasi perparkiran yang ditanganinya, dan bertanggung jawab kepada Direksi Manager Operasi.
- f. Dan Juru Parkir (Jukir) merupakan tenaga lapangan yang langsung melayani pemakai kendaraan dalam menggunakan tempat-tempat parkir yang disediakan.

Untuk jelasnya dapat dilihat bagan struktur organisasi di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI

PT. PURINA



C. SARANA DAN PARASARANA PARKIR

Berdasarkan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 62 78 tahun 1994, yang menjadi sarana dan parasarana parkir telah ditetapkan lokasi sebagai tempat-tempat parkir poros jalan lokasi parkir dan titik-titik parkir, sebagai berikut :

Mengenai poros jalan yang dijadikan lokasi parkir adalah :

1. Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo
2. Jalan Sulawesi
3. Jalan Penghibur
4. Jalan Somba Opu
5. Jalan Veteran
6. Jalan Tentara Pelajar
7. Jalan Nusantara
8. Jalan Jend. Achmad Yani
9. Jalan Bulusaraung
10. Jalan G. Lantimojong

Sedangkan yang menjadi Titik-Titik Parkir adalah :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Jl. Nusakambangan | 8. Jl. Datumuseng |
| 2. Jl. Wr. Supratman | 9. Jl. Akademis |
| 3. Jl. Bali | 10. Jl. Kerung-Kerung |
| 4. Jl. Serui | 11. Jl. G. Lompobanttang |
| 5. Jl. Cenderawasi | 12. Jl. Rajawali |
| 6. Jl. Hati Murni | 13. Jl. Balakota |
| 7. Jl. Nusakambangan | 14. Jl. Tembusan Nusakambangan |
| 15. Jl. Karunrung | 42. Jl. Ranggong |

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 16. Jl. Pasar Ikan | 43. Jl. Sungai Sadding |
| 17. Jl. Timor | 44. Jl. Lanto Dg. Pasewang |
| 18. Jl. Sungai Cerekang | 45. Jl. Slamet Riayadi |
| 19. Jl. DR. Ratulangi | 46. Jl. Arief Rate |
| 20. Jl. Kakatua | 47. Jl. A.P. Petta Rani |
| 21. Jl. G. Tinggi Mae | 48. Jl. Tinumbu |
| 22. Jl. WR. Monginsidi | 49. Jl. Lamuru |
| 23. Jl. Sarappo | 50. Jl. Butung |
| 24. Jl. Mesjid Raya | 51. Jl. Bontolempangan |
| 25. Jl. Bandang | 52. Jl. Riburane |
| 26. Jl. Sultan Hasanuddin | 53. Jl. Latumahia |
| 27. Jl. Pattimura | 54. Jl. Garuda |
| 28. Jl. Lamaddukeleng | 55. Jl. Kumala |
| 29. Jl. A. Mappanyukki | 56. Jl. Pangeran Dipanegoro |
| 30. Jl. Urip Sumoharjo | 57. Jl. Kajoalaliddo |
| 31. Jl. Thamrin | 58. Jl. Rappocini Raya |
| 32. Jl. Lasinran | 59. Jl. KH. M. Ramli |
| 33. Jl. S u n u | 60. Jl. H. Agus Salim |
| 34. Jl. KH. Wahid Hasyim | 61. Jl. SULTan Alauddin |
| 35. Jl. HOS.Cokroaminoto | 62. Jl. Tarakan |
| 36. Jl. Lamuru | 63. Jl. Sangir |
| 37. Jl. Banda | 64. Jl. Sarappo |
| 38. Jl. Banda | 65. Jl. Gunung Merapi |
| 39. Jl. Lombok | 66. Jl. Batu Putih |
| 40. Jl. Andalas | 67. Jl. Santado |
| 41. Jl. Samalona | 68. Jl. Yos Sudarso |
| 69. JL. Maccini Baru | 96. JL. Khairil Anwar |



- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 70. JL. Gunug Lokong | 97. JL. Jend. Hertasning |
| 71. JL. Haji Bau | 98. JL. Sabutung |
| 72. JL. Muh. Saleh | 99. JL. Singa |
| 73. JL. Onta | 100. JL. Tupai |
| 74. JL. Gunug Nona | 101. JL. Baru |
| 75. JL Onta Baru | 102. JL. Jend. Sudirman |
| 76. JL. Serigala | 103. JL. Landak |
| 77. JL Ujung Pandang Baru | 104. JL. S.Saddang Baru |
| 78. JL. A. Mappaoddang | 105. JL. Dg. Tata |
| 79. JL. Rusa | 106. JL. Emmy Saelan |
| 80. JL. Landak Baru | 107. JL. Ujung |
| 81. JL. Kalimantan | 108. JL. Rachmat Hakim |
| 82. JL. Abdullah Dg. Sirua | 109. JL. Andi Tonro |
| 83. JL. Barukang | 110. Kawasan Latene Plasa |
| 84. JL. Ujung Pandang | 111. Supermarket Baji. P |
| 85. JL. G. Buntu Terpedo | 112. Supermarket Gelael |
| 86. JL. Panakkukang Mas | 113. Supermarket K.Melati |
| 87. Kawasan Pelita Mas | 114. Supermarket Mursalim |
| 88. Supermarket Hawa Baru | 115. Supermarket Halim |
| 89. Jl. Jampea | |
| 90. JL. Gatot Subroto | |
| 91. JL Cakalang | |
| 92. JL. Pongtiku | |
| 93. JL. Cumi-Cumi | |
| 94. JL. M u n a | |
| 95. JL. Mochtar Lufti | |

Penentuan titik-titik parkir dan lokasi parkir pada poros jalan tersebut, ditetapkan oleh Badan pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan tetap memperhatikan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran.

Dari sarana dan prasarana perparkiran di atas, oleh pihak PT. Purina sebagai perusahaan swasta ditunjuk oleh Pemerintah daerah menangani pengelolaan pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang, membagi ke dalam 8 (depalan) wilayah, yang terdiri dari :

1. Wilayah I terdiri dari : Jl. Sulawesi
Jl. Nusantara
2. Wilayah II terdiri dari : Jl. K.H. Ramli
Jl. Makassar Mall
3. Wilayah III terdiri dari : Jl. Bandang
Jl. G. Bawakaraeng
Jl. Pasar Terong
Jl. S u n u
Jl. G. Bulusaraung
4. Wilayah IV terdiri dari : Jl. Somba Opu
Jl. Pasar Baru
Jl. St. Hasanuddin
5. Wilayah V terdiri dari : Jl. G. Lantimojong
Jl. Pasar Terong
Jl. Mesjid Raya

6. Wilayah VI terdiri dari : Jl. Cenderawasi
 Jl. DR. Ratulangi
 Jl. Kakatua
 Jl. Lagaligo
 Jl. Veteran
7. Wilayah VII terdiri dari : Jl. St. Alauddin
 Jl. A.P.Pette Rani
 Pasar Pa'baeng-baeng
8. Wilayah VIII terdiri dari : Jl. Irian
 Jl. Ahmad Yani

Melihat sarana dan prasarana yang disiapkan baik oleh Dipenda Tk. II Ujung Pandang maupun yang dikelola oleh PT. Purina dapatlah dikemukakan bahwa dalam pengelolannya membutuhkan tatanan satuan kerja setiap lokasi/wilayah, agar pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dapat terlaksana dengan baik dan lancar, mengingat lokasi perparkiran sangat luas.

Selain disiapkan lokasi perparkiran, juga telah disiapkan pula karcis pengutan retribusi parkir baik yang harian ataupun pelanggan bulanan, disamping itu telah ditempatkan pos-pos bagi lokasi yang memungkinkan, seperti di kawasan Makassar Mall dan Iatanete Plaza.

D. KEADAAN LOKASI DAERAH PARKIR

Ditinjau dari struktur organisasi dan sarana prasarana perparkiran baik dari Badan Pengelola Perparkiran Dipenda Tk. II Ujung Pandang maupun dari PT. Purina Ujung

Pandang dapat dikatakan sangat menjanjikan harapan serta prospek masa depan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi bila melihat keadaan lokasi parkir yang ada sekarang ini, sangat membutuhkan peningkatan baik pengelolaan pemungutan retribusi parkir, maupun terhadap sarana parkir yang disiapkan kurang memenuhi syarat sebagaimana layaknya tempat parkir yang dikelola oleh satu perusahaan dalam hal ini perusahaan PT. Purina Ujung Pandang.

Seharusnya lokasi parkir yang dikelola oleh satu perusahaan memperlihatkan mutu kualitas yang baik, tetapi kenyataan yang ada keadaan tempat parkir yang dikelola oleh PT. Purina yang bekerjasama dengan Dipenda Tingkat II Ujung Pandang seakan-akan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan atau mengembangkan kelayakan tempat-tempat parkir untuk retribusi.

Seperti keadaan lokasi parkir yang penulis peroleh melalui data dan informasi, sebagian besar menggunakan halaman-halaman toko dimana tempatnya sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi perparkiran, karena hanya menampung beberapa jumlah kendaraan saja. Pengalaman seperti ini sepatutnya menjadi bahan penelitian untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah untuk mengklasifikasikan tempat-tempat parkir yang memenuhi syarat, seperti pada lokasi parkir di perusahaan-perusahaan, kompleks pertokoan, rumah sakit, perhotelan, serta lain-lain yang dianggap memenuhi syarat.

Sebagaimana data yang diperoleh mengenai keadaan lokasi daerah parkir, meliputi :

1. Pelanggan bulanan retribusi parkir, terdiri dari :
 - a. 144 lokasi parkir dari toko-toko, dan
 - b. 43 lokasi parkir yang bukan pelanggan bulanan, serta perusahaan-perusahaan.
2. Lokasi parkir yang bukan pelanggan bulanan, terdiri dari :
 - a. 27 Bank
 - b. 8 Rumah Sakit
 - c. 4 Rumah Makan
 - d. 4 Apotik
 - e. 9 Bioskop
 - f. 10 PT (Perusahaan)
 - g. 7 Toko-toko / Swalayan
 - h. 7 Hotel
 - i. 4 Pasar
 - j. 6 Lain-lain.

BAB IV

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa kegiatan pengelolaan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka melalui pembahasan ini diupayakan sejauhmana kegiatan pengelolaan pemungutan retribusi parkir Pendapatan Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina di Kotamadya Ujung Pandang.

A. PENGELOLAAN PERENCANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Berbicara tentang koordinasi berarti tidak lepas dari masalah perencanaan, guna mendapatkan cara atau jalan yang terbaik untuk melaksanakan penyusunan rencana/program yang baik agar setiap pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya mencapai hasil yang sempurna, efisien, keseragaman pekerjaan guna mencapai hasil yang diharapkan. Sebagaimana bagan struktur koordinasi pemungutan retribusi dalam kegiatannya baik dalam pengawasan maupun pelaporan kegiatan kerja dilakukan dari bawah ke atas, maka demikian pula proses koordinasi perencanaan dilakukan dari bawah ke atas (Bottom Up Planning). Hal ini dilakukan karena untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi para tenaga-tenaga lapangan (Juru Parkir) yang minus atau relatif setorannya, dalam rangka meningkatkan



hasil pemungutan retribusi parkir yang dilaksanakannya.

Peningkatan perencanaan pemungutan retribusi parkir diusahakan seoptimal mungkin sesuai kemampuan dengan cara mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam pengelolaan perencanaan ini unsur-unsur yang terlibat penyusunan rencana/program pengelolaan perparkiran adalah meliputi :

1. Bapak Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagai penanggung jawab.
2. Badan Pembina yang terdiri dari Kepala Dipenda Tk. II Ujung Pandang, Kepala Bagian Hukum dan Orta Kotamadya Ujung Pandang, Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Kepala Bagian Keuangan Kotamadya Ujung Pandang.
3. Badan Pengelola, pimpinan yang dibantu oleh Staf teknis dan Staf Administrasi.
4. Lintas sektoral dan DAN SAT LANTAS Polrestabes dan Kepala LLAJR Kotamadya Ujung Pandang.
5. Dari pihak perusahaan swasta (PT. Purina) sebagai pelaksana operasional pemungutan retribusi parkir, melibatkan Direktur Utama, dibantu oleh para Direksi dan Managernya.

Dari hasil-hasil laporan yang masuk setelah dievaluasi pelaksanaan program/rencana yang dikelola

mengenai Pengelolaan lokasi dan tempat parkir apakah layak atau tidak, ketertiban dan keamanan perparkiran, serta sasaran dan target yang dicapai apakah sesuai yang diharapkan sebagaimana ditetapkan sebelumnya, serta hasil penelitian dan pengawasan yang dapat dipantau dalam pengelolaan perparkiran. Dapatlah dipertimbangkan penyusunan program/rencana pengelolaan perparkiran selanjutnya sekaligus memperbaiki kekurangan-kekurangan pada tahun sebelumnya yang diperoleh baik dari Dipenda maupun oleh PT. Purina sebagai pelaksana operasional.

Untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan perencanaan antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini.

TABEL 9

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERENCANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ANTARA DIPENDA TK. II UP DENGAN PT. PURINA

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent. (%)
			S. Mendukung	Mendukung	T. Mendukung	
1.	Dipenda Tk. II UP	23	9	11	3	31,5
2.	PT. Purina	50	17	29	4	68,5
Jumlah		73	26	40	7	100 %
Persentase		100%	35,6%	54,8%	9,6 %	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penelitian Lapangan, Agustus 1996

Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa yang mendapat nilai tertinggi tanggapan informan tentang pengelolaan perencanaan antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina, adalah tanggapan mendukung memperoleh nilai 40 atau sama dengan 54,8 % dan tanggapan sangat mendukung memperoleh nilai 26 atau sama dengan 35,6 %, sedang tanggapan kurang mendukung memperoleh nilai 7 atau sama dengan 9,6 %.

Sehubungan dengan hasil tanggapan responden tersebut dapatlah penulis simpulkan bahwa penyusunan rencana/program pengelolaan perpajakan khususnya dalam pemungutan retribusi parkir belum terlaksana secara terpadu dan serasi, sehingga sasaran dan target yang ingin dicapai kurang memenuhi sesuai sasaran dan target yang diharapkan sesuai yang ditetapkannya. Oleh karenanya dalam penyusunan rencana/program pada masa yang akan datang perlu ditingkatkan dengan memperhatikan secara keseluruhan program/proyek secara terpadu dan merata, serasi tanpa melepaskan prioritas pengelolaan perpajakan yang sangat berperan dalam meningkatkan pengelolaan pemungutan retribusi parkir.

Penyusunan rencana/program sebaiknya memperhatikan kondisi yang ada, menyesuaikan lokasi dan tempat-tempat parkir yang dikelola dengan sasaran dan target yang ditetapkan, jangan sampai target yang ingin dicapai tidak

kesampaian karena kondisi perpustakaan turut mempengaruhinya. Perencanaan yang baik apabila dapat mempermudah tercapainya tujuan dan bukan mempersulit tercapainya tujuan, sederhana tetapi disertai dengan perincian yang teliti dan cermat serta bersifat praktis.

Sebagai pertimbangan sejauhmana penentuan rencana mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat melalui tanggapan responden dalam tabel di bawah ini.

TABEL 10

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI DUKUNGAN PERENCANAAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent. (%)
			S.Mendukung	Mendukung	T.Mendukung	
1.	Dipenda Tk. II UP	23	13	8	2	31,5
2.	PT. Purina	50	21	22	7	68,5
Jumlah		73	34	30	9	100 %
Persentase		100%	47 %	41 %	12 %	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara Penelitian Lapangan, Agustus 1996

Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa yang mendapat nilai tertinggi mengenai tanggapan informasi tentang dukungan perencanaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan perpustakaan, adalah tanggapan sangat mendukung memperoleh nilai tertinggi yaitu 34 atau sama dengan 47 %,

dan tanggapan mendukung memperoleh nilai 30 atau sama dengan 41 %, sedang tanggapan kurang mendukung memperoleh nilai 9 atau sama dengan 12 %.

Hasil tanggapan informan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa dalam pengelolaan perparkiran khususnya dalam pemungutan retribusi parkir, kegiatan perencanaan sangat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi realisasi yang diperoleh dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir yang secara operasional dikelola oleh PT. Purina belum mencapai target sesuai yang diberikan dari Dipenda Tingkat II Ujung Pandang. Ini menandakan koordinasi perencanaan dirasa perlu ditingkatkan guna pencapaian target yang telah ditetapkan Dipenda Tingkat II Ujung Pandang kepada PT. Purina.

Peningkatan koordinasi perencanaan pengelolaan perparkiran yang dianggap perlu yaitu adanya pertemuan berkala diantara unsur-unsur terkait baik dari Badan Pengelola Perparkiran Pemerintah Daerah maupun dari PT. Purina sebagai perusahaan swasta yang mendapat kepercayaan pemerintah mengelola pemungutan retribusi parkir Ujung Pandang. Pertemuan berkala yang dimaksud di sini ialah pertemuan yang dilakukan dari unsur paling rendah ke tingkat unsur yang tertinggi dalam organisasi (Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan PT. Purina), dengan jadwal pertemuan yang tetap, hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing unit dan memudahkan mengevaluasi dan mengawasi pekerjaan masing-masing unit. Seperti untuk mengetahui dan mengontrol hasil pemungutan retribusi parkir setiap harinya, kemudian per-bulan, dengan pertemuan berkala dapat dengan cepat di-antisipasi bila ada penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula dalam hal keamanan dan ketertiban lokasi-loaksi parkir dapat dengan cepat diketahui data-data dan informasi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dengan cepat diantisipasi utamanya dalam keamanan dan ketertiban pelayanan kendaraan yang akan diparkir, dan kelayakan tempat parkir dipandang secara umum.

Kelayakan lokasi dan tempat parkir dianggap sangat penting untuk meningkatkan hasil yang diinginkan dibanding tahun-tahun yang lalu, mengapa? dari hasil tanggapan responden, penulis memperoleh data dan informasi bahwa kurangnya pencapaian target disebabkan kurang layaknya tempat-tempat parkir dan membuat pemakai kendaraan kurang simpatik bahkan sedikit bandel pada para juru parkir. Untuk mengetahui sejauhmana kelayakan tempat-tempat parkir yang disiapkan Badan Pengelola Perparkiran, dapat dilihat dalam tanggapan responden berikut ini.



TABEL 11

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KELAYAKAN TEMPAT PARKIR
TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent. (%)
			Sang.Layak	Layak	Kur.Layak	
1.	Dipenda Tk. II UP	23	4	11	8	31,5
2.	PT. Purina	50	8	17	25	68,5
: J u m l a h		: 73 :	12	28	33	100 %
: P e r s e n t a s e		: 100%:	16,4 %	38,4 %	45,2%	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Seperti dalam tabel di atas, menunjukkan hasil tanggapan informan yang paling tinggi nilainya adalah tanggapan kurang layak dengan nilai 33 atau sama dengan 45,2 %, dan tanggapan layak mendapat nilai 28 atau sama dengan 38,40 %, sedang tanggapan sangat layak mendapat nilai 12 atau sama dengan 16,4 %.

Sehubungan dengan hasil tanggapan informan yang menunjukkan lebih dominan kurang layaknya tempat-tempat parkir dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir, sangat berpengaruh di dalam pencapaian target. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan informan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

TABEL 12
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENCAPAIAN TARGET
YANG DICAPAI

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent. (%)
			Mel.Target	Se.Target	K.dr.target	
1.	Dipenda Tk. II UP	23	-	-	23	31,5
2.	PT. Purina	50	-	-	50	68,5
Jumlah		73	-	-	73	100 %
Persentase		100%	-	-	100 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996.

Dari tabel di atas, diperoleh bahwa dari 73 orang responden semuanya memberikan jawaban/tanggapan hasil pemungutan retribusi parkir kurang dari target yang ditetapkan. Dari hasil tanggapan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa pengelolaan pemungutan retribusi parkir oleh PT.Purina selaku pelaksana operasional membutuhkan pembenahan di segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran, terutama dalam menumbuhkan simpatik dan kesadaran pengguna jasa parkir dan ini tentunya perlu meningkatkan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan unit-unit pengelola parkir, serta penelitian yang cermat untuk mendapatkan data-data di dalam pengembangan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di masa-masa datang, yang kesemuanya itu melalui penentuan rencana/program yang tepat pula.

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi setiap unit kerja, dan berupaya memperbaikinya yang di-tuangkan dalam rencana-rencana/program-program kerja mulai dari tingkat bawah sampai kepada tingkat atas, maka pen-capaian target pemungutan retribusi parkir dan kelayakan tempat-tempat parkir dapat terrealisir, karena populasi pengguna jasa parkir di Kotamadya Ujung Pandang sangat besar.

B. PENGAWASAN PENGELOLAAN AN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR ANTARA DIPENDA TK. II UJUNG PANDANG DENGAN PT. PURINA

Pengelolaan perparkiran adalah merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi untuk menjamin agar di dalam pelaksanaannya dapat di-selenggarakan pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, keamanan dan ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta dapat mengurangi beban sosial melalui pen-yerapan tenaga kerja, maka pada tahun 1988 melalui penyer-apan tenaga kerja, maka pada tahun 1988 melalui surat keputusan Walikotamadya Daerah Tingakt II Ujung Pandang Nomor 816/S.Kep/061.2/HK/88. Ditunjukkan Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertugas membantu Kepala kegiatan pengelolaan perparkiran yang meliputi ; Admi-nistrasi umum, keuangan, logistik, penyediaan tanda retribusi parkir, kepegawaian, pembukuan dan lain-lain di bidang administrasi. Kemudian sejalan dengan perkembangan

dewasa ini dan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pada tahun 1994 pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta di dalam pemungutan retribusi parkir, sehingga dengan sendirinya unsur yang terkait dalam pelaksanaan koordinasi bertambah oleh PT. Purina sebagai pelaksana operasional.

Sesuai ketentuan Sk. Walikotamadya Nomor 816/S.Kep/061.2/HK/88, tentang pengelolaan perparkiran ditegaskan bahwa Wakil Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan memegang peranan dan fungsi koordinatif terhadap unsur-unsur terkait dalam pengelolaan perparkiran. Dengan demikian Wakil Kepala Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengadakan pertemuan berkala baik secara formal maupun informal, serta pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap awal bulan.

Selain itu dalam rapat-rapat dinas dengan lintas sektoral dan kepala-kepala Unit/Bidang secara insidental membahas permasalahan yang ada, termasuk Direktur Utama PT. Purina dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan unit-unit yang ada dalam lingkungan perusahaan yang selanjutnya dilanjutkan ke atas yaitu bersama Badan Pengelola perparkiran dan unsur-unsur terkait lainnya. Seperti Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang membina Badan Pengelola Perparkiran, dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung kelancaran pemungutan retribusi



parkir, pengaturan parkir dan pemungutan retribusi parkir yang ditangani pihak swasta.

Wakil Kepala Bidang Administrasi dan keuangan sebagai bagian yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan perparkiran, hendaknya menyadari akan kedudukan dan tugasnya sebagai pengelola demi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang. Dalam hal melibatkan beberapa instansi dan kepala-kepala bagian dalam program pengelolaan perparkiran, hal yang tidak kurang pentingnya adalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program setiap unit.

Untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, maka perlu disusun suatu pola dasar pengelolaan perparkiran yang merupakan pola umum pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir di wilayah Kotamadya Ujung Pandang.

Dengan tersusunnya pola dasar pengelolaan perparkiran, maka badan-badan, bagian-bagian, unit-unit, selaku unsur terkait dalam pengelolaan perparkiran harus mempedomani pola dasar tersebut yang ditetapkan oleh Walikotamadya sebagai penanggung jawab pengelolaan perparkiran daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikemukakan tentang pengelolaan pemungutan retribusi parkir antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina dalam pemungutan retribusi parkir, dalam pelaksanaannya sebaiknya melalui penetapan pola dasar menyusun rencana/program pengelolaan perparkiran dengan tahap-tahap sebagai berikut

1. Tahap Identifikasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan untuk mengadakan peninjauan keadaan tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah yang dihadapi dan potensi perparkiran yang dimiliki, demikian pula perlu diadakan peninjauan aspek-aspek keuangan, dan sebagainya. Tahap ini dilakukan sebaiknya pada tingkat team operasional yang terdiri dari para Jukir (Juru Parkir).

Tahap ini sangat penting dalam memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang menyangkut perparkiran dan pemungutan retribusi parkir dalam hubungan pelaksanaan penyusunan rencana/program pengelolaan parkir di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini, data dan informasi yang diterima dari setiap team pelaksana operasional (Team harian, Team Target Bulanan, serta Unit-unit parkir Badan Pengelola Perparkiran), dibahas bersama-sama Manager Operasi dan staf teknis, serta staf Administrasi yang dibimbing oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Bidang Operasi dengan Direksi Umum/Operasi dalam lingkungan masing-masing (Badan Pengelola Perparkiran Dipenda Tk. II Ujung Pandang dan PT. Purina).

Dari rumusan Staf Tehnis dan Wakil Kepala Badan Pengelola Bidang Operasi Dipenda Tk. II Ujung Pandang,

serta rumusan Manager Operasi dan Direksi Umum/Operasi pada PT. Purina, diadakan penilaian untuk menentukan rencana/program yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan tahun akan datang dalam pengelolaan perparkiran di Kotamadya Ujung Pandang.

3. Tahap Pengesahan

Di bawah koordinasi Pimpinan Badan Pengelola Perpustakaan yang dibantu oleh Wakil Kepala Bidang Administrasi dan keuangan bersama Direktur Utama PT. Purina, Usul rencana/program hasil tahap penilaian dibahas dan diolah terlebih dahulu bersama dengan unsur terkait lainnya. Dan berdasarkan petunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ujung Pandang, usul rencana/program dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, untuk menghasilkan rumusan usulan rencana/program pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selanjutnya hasil pembahasan tersebut dapat disyahkan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

4. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program-program pengelolaan perpustakaan dalam pemungutan retribusi parkir disesuaikan dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Dengan melalui tahapan-tahapan di atas, nampak jelas bahwa pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi memungkinkan keterpaduan dan keserasian di dalam mengelola perpajakan tercapai secara murni dan mantap.

Asumsi pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi yang diajukan ini dianggap penting, mengingat dari hasil data dan informasi yang diperoleh masih banyak mengalami hambatan, demikian pula PT. Purina sebagai perusahaan yang turut mengelola secara operasional pemungutan retribusi parkir, masih sangat membutuhkan peningkatan dukungan Pemerintah daerah tingkat II Ujung Pandang.

Untuk mengetahui sejauhmana hambatan dan kebutuhan dukungan Pemerintah Daerah oleh PT. Purina dapat dilihat dalam tabel tanggapan responden berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sebagai berikut :

TABEL 13

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI HAMBATAN YANG DITEMUI
DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
			Sangat Banyak	Banyak	Kurang	
1.	Dipenda Tk.II UP	23	7	9	7	31,5
2.	PT. Purina	50	26	24	-	68,5
Jumlah		73	33	33	7	100 %
Persentase		100%	45 %	45 %	10 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Dari tabel di atas, telah menunjukkan bahwa tanggapan informan yang mendapat nilai tertinggi adalah tanggapan sangat banyak dan tanggapan banyak yang masing-masing memperoleh nilai 33 atau sama dengan 45%, sedang tanggapan kurang menemui hambatan memperoleh nilai 7 atau sama dengan 10 %.

Sementara dari data dan informasi yang diperoleh mengenai kebutuhan PT. Purina akan dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi parkir dapat pula digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 14
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEBUTUHAN PT. PURINA
AKAN DUKUNGAN DIPEMDA TK. II UJUNG PANDANG

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
			Sangat Butuh	Butuh	K. Butuh	
1.	Dipenda Tk.II UP	23	5	8	10	31,5
2.	PT. Purina	50	27	21	2	68,5
: J u m l a h		: 73 :	32	29	12	:100 %
: Persentase		:100%:	44 %	40 %	16 %	:100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Melalui tabel di atas, menunjukkan hasil tanggapan informan yang mendapat nilai tinggi adalah tanggapan sangat butuh nilai 32 atau sama dengan 44 %, dan tanggapan butuh mendapat nilai 29 atau sama dengan 40 %, sedang



tanggapan yang menyatakan kurang butuh dukungan Pemerintah Daerah mendapat nilai 12 atau sama dengan 16%.

Melihat tabel tersebut di atas (tabel 12 dan 13), dapatlah dikemukakan bahwa besarnya harapan PT. Purina untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah cukup ber-alasan, karena dalam pengelolaan selama ini masih banyak menemui hambatan, seperti tempat parkir yang kurang layak untuk memungut retribusi parkir, juga kurangnya kesadaran sebagian masyarakat manfaat dari pengguna jasa parkir.

Dengan banyaknya hambatan dan besarnya harapan akan dukungan pemerintah daerah terhadap PT. Purina sebagai pelaksana operasional pemungutan retribusi parkir, dapatlah diasumsikan bahwa pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina di dalam pengelolaan pemungutan retribusi parkir dirasa perlu ditingkatkan. Demikian pula penentuan rencana/program terpadu dan merata dengan melalui penyusunan rencana/program yang cermat dan tepat sehingga pencapaian target di masa akan datang dapat terpenuhi bagaimana mestinya. Asumsi tersebut bukan berarti pelaksanaan koordinasi yang sudah dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik, akan tetapi agar supaya tercipta suatu pem-baharuan ke arah terciptanya perubahan-perubahan ke arah peningkatan pemungutan retribusi parkir lebih baik dari sebelumnya.

Sebagaimana data dan informasi yang diperoleh melalui tanggapan responden dalam penelitian lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pengelolaan per-parkiran telah berjalan dan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 15

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR ANTARA DIPEDA TK. II UJUNG PANDANG DENGAN PT. PURINA

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
			Sangat Lancar	Lancar	K.Lancar	
1.	Dipenda Tk.II UP	23	8	11	4	31,5
2.	PT. Purina	50	19	26	5	68,5
Jumlah		73	27	37	9	100 %
Persentase		100%	37 %	51 %	12 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden memperoleh nilai tertinggi adalah tanggapan lancar nilai 37 atau sama dengan 51 %, dan tanggapan sangat lancar mendapat nilai 27 atau sama dengan 37 %, sedang tanggapan kurang lancar mendapat nilai 9 atau sama dengan 12 %.

Melalui hasil tanggapan responden membuktikan (tabel 14) bahwa lancarnya pelaksanaan koordinasi yang

dilaksanakan sekarang bukan berarti pengelolaan retribusi parkir tidak menemui lagi hambatan, akan tetapi hambatan tersebut datangnya karena kurangnya kesiapan rencana/program dalam pengelolaan perparkiran, seperti tempat-tempat parkir yang masih kurang layak membuat sebagian pengguna jasa parkir kurang berkenang membayar retribusi.

C. PENGENDALIAN DAN PENGAWASANNYA

Setelah penyusunan rencana/program dan koordinasi unit-unit pengelola perparkiran dalam pengelolaan retribusi parkir ditingkatkan, maka yang tidak kalah pentingnya pula ialah peningkatan pengendalian dan pengawasannya.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan perparkiran oleh Badan Pengelola telah memberikan tugas kepada Unit-unit Parkir untuk mengadakan pemeriksaan dan pengamatan parkir, baik terhadap ketertiban dan keamanan tempat parkir maupun pelaksanaan penggunaan retribusi parkir. Hasil dari pada pengawasan dan pengamatannya kemudian dilaporkan pada Bagian Pendapatan, Anggaran dan Pembukuan, dimana Unit-unit Parkir mendapatkan pengawasan dan pembinaan sistem keuangan, setelah itu oleh Bagian Pendapatan, Anggaran dan Pembukuan setelah memeriksa laporan tersebut, lalu mengajukan ke Bagian Urusan Pengawasan Usaha dan Ketertiban Perparkiran untuk dievaluasi, bila dianggap laporan tersebut layak maka oleh Urusan Pengawasan

Usaha melaporkan kepada Kepala Badan Pengelolaan sebagai laporan kegiatan dan tanggung jawabnya kepada Walikota-madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang selaku penanggung jawab pengelolaan perparkiran di Ujung Pandang.

Sementara pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi oleh PT. Purina Ujung Pandang sebagai perusahaan swasta yang mengelola pemungutan retribusi parkir di Ujung pandang, mulai dari Para Jukir yang mendapat pengawasan langsung dari Kabag. Operasi, dari hasil-hasil yang dicapai Jukir oleh Kabag. Operasi melaporkan kepada Seksi Umum. Seksi Umum kemudian melaporkan kepada Direktur. Di samping mempelajari laporan-laporan Seksi Umum, Direktur mengevaluasi pula hasil pengamatan Supervisi yang mengawasi langsung para Jukir, Bagian Operasi, serta Seksi Umum apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pelaksanaan tugas masing-masing. Setelah dianggap laporan tersebut oleh Direktur PT. Purina diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Perpustakaan Kotamadya Ujung Pandang, yaitu terhadap Urusan Pengawasan Usaha dan Ketertiban Perpustakaan.

Pengendalian dan pengawasan pemungutan retribusi parkir bila dilihat uraian di atas, dapatlah dikemukakan bahwa pelaksanaan dan Struktur pengendalian dan pengawasannya cukup baik, tetapi bagaimana dengan hasil-hasil yang dicapai, itu dapat digambarkan melalui hasil tanggapan responden dimana diperoleh data dan informasi

mengenai pelaksanaan perparkiran di Kotamadya Ujung Pandang.

Untuk mengetahui sejauhmana keberadaan pihak swasta menciptakan ketertiban dan keamanan perparkiran dapat dilihat melalui data dan informasi hasil tanggapan responden sebagai berikut :

TABEL 16

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEBERADAAN PIHAK SWASTA DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN PERPARKIRAN

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
			Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	
1.	Dipenda Tk.II UP	23	4	17	2	31,5
2.	PT. Purina	50	19	31	-	68,5
Jumlah		73	23	48	2	100 %
Persentase		100%	32 %	66 %	2%	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Dengan melihat tabel di atas, dapatlah diperoleh tanggapan responden yang tertinggi nilai adalah tanggapan baik nilai 48 atau sama dengan 66%, dan tanggapan sangat baik mendapat nilai 23 atau sama dengan 32 %, sedang tanggapan kurang baik mendapat nilai 2 atau sama dengan 2%.

Karena tanggapan responden (Tabel 15), diperoleh bahwa keberadaan pihak swasta dengan baik menciptakan ketertiban dan keamanan perparkiran, tentu tidak dapat



ditarik kesimpulan bahwa lokasi dan tempat-tempat parkir yang ada telah memenuhi kelayakan pemungutan retribusi parkir, sebagaimana tujuan pengawasan yang dilaksanakan dalam pengelolaan perparkiran yaitu untuk mencegah dan untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kesemuanya itu belumlah tercapai sebagaimana mestinya, ketertiban dan keamanan parkir dapat dikendalikan tetapi bukan itu saja yang menjadi ukuran keberhasilan pengawasan dalam pengelolaan perparkiran, akan tetapi keberhasilan pengendalian dalam pengawasan pengelolaan perparkiran dapat dikatakan berhasil, bila dapat meningkatkan kesadaran pengguna jasa parkir untuk berperan meningkatkan pendapatan asli daerah yang berguna bagi pembangunan daerahnya sendiri, mengapa? karena bila pengendalian dan pengawasan mampu menciptakan perbaikan-perbaikan ke arah peningkatan kesadaran pengguna jasa parkir untuk berperan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembayaran retribusi parkir maka dengan sendirinya pencapaian target tercapai, bahkan dapat memungkinkan melebihi target mengingat populasi pengguna jasa parkir di Kotamadya Ujung Pandang cukup besar.

Untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, tentu dibutuhkan peningkatan kemampuan aparat pengawas. Sejalan

dengan maksud tersebut dapatlah digambarkan hasil perolehan data dan informasi melalui tanggapan responden mengenai kemampuan aparat pengawasan pengelolaan perparkiran berikut ini :

TABEL 17

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

No. Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
		S. Dibutuhkan	Dibutuhkan	K. Dibutuh	
1. Dipenda Tk. II UP	23	4	16	3	31,5
2. PT. Purina	50	11	33	6	68,5
Jumlah	73	15	49	9	100 %
Persentase	100%	21 %	67 %	12 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Melalui tabel di atas, diperoleh bahwa yang memperoleh nilai tertinggi adalah tanggapan dibutuhkan nilai 49 atau sama dengan 67 %, dan tanggapan sangat dibutuhkan memperoleh nilai 15 atau sama dengan 21 %, serta tanggapan kurang dibutuhkan memperoleh nilai 9 atau sama dengan 12 %.

Dibutuhkannya peningkatan kemampuan aparat pengawasan di sini cukup beralasan, mengingat masih banyaknya perbaikan-perbaikan sarana perparkiran ke arah pencapaian kelayakan pemungutan retribusi parkir yang sekaligus dapat meningkatkan kesadaran pengguna jasa parkir.

Seperti yang diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil data dan informasi yang masuk yang digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 18

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

No. Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
		S. Mendukung	Mendukung	K. Mendukung	
1. Dipenda Tk. II UP	23	6	9	8	31,5
2. PT. Purina	50	3	11	36	68,5
Jumlah	73	9	20	44	100 %
Persentase	100%	12,3 %	27,4 %	60,3 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Tabel tersebut di atas telah menunjukkan bahwa melalui tanggapan responden telah diperoleh tanggapan kurang mendukung mendapatkan nilai tertinggi yaitu 44 atau sama dengan 60,3 %, dan tanggapan mendukung memperoleh nilai 20 atau sama dengan 27,4 %, sedang tanggapan sangat mendukung memperoleh nilai 9 atau sama dengan 12,3%.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan responden dalam hubungannya dengan pengelolaan perparkiran utamanya terhadap pemungutan retribusi parkir di Kotamadya Ujung Pandang, dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai pengelolaan perparkiran yang layak, tentu masih membutuhkan lokasi

dan tempat-tempat parkir yang memenuhi keinginan pengguna jasa parkir dan untuk mewujudkan maksud tersebut, bagian penelitian dan pengembangan harus bekerja lebih cermat dan tepat dalam melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan perparkiran, dan kesemuanya ini sangat membutuhkan perencanaan yang tepat, koordinasi yang mantap, serta peningkatan kemampuan aparat pengawasan.

D. HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PARKIR DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG

Adapun hambatan pelaksanaan pengelolaan antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina dalam pemungutan retribusi parkir, untuk mengetahui lebih jauh dapat dilihat dapat tabel anggapan responden berikut :

TABEL 19

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI UJUNG PANDANG

No.	Responden	N=73	Tanggapan			Persent (%)
			Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	
1.	Dipenda Tk.II UP	23	8	6	9	31,5
2.	PT. Purina	50	27	14	9	68,5
Jumlah		73	35	20	18	100 %
Persentase		100%	48 %	27 %	25 %	100 %

Sumber data : Hasil Wawancara, Agustus 1996

Melalui tabel di atas diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina di Kotamadya Ujung Pandang, berdasarkan tanggapan responden yang mendapat nilai tertinggi adalah kemampuan aparat dengan nilai 35 atau sama dengan 48 %, dan tanggapan hambatan yang ditemui melalui perencanaan mendapat nilai 20 atau sama dengan 27 %, sedang tanggapan hambatan yang dialami melalui pengawasan mendapat nilai 18 atau sama dengan 25%.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan koordinasi adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Sehingga dengan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui melalui kemampuan aparat, perencanaan dan pengawasannya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir antara Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina Ujung Pandang, menunjukkan pengelolaan retribusi parkir di Ujung Pandang masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan di dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai maksud tersebut, tentu dibutuhkan pemantapan pelaksanaan koordinasi, karena melalui pemantapan koordinasi memungkinkan suatu penyelesaian secara menyeluruh atau total accomplishment atas eksekusi bagian individu yang membentuk total itu, serta menemukan konsep yang dapat



menjadi satu kesatuan integral dari beberapa macam tingkatan unit organisasi, yang dapat dijadikan sebagai pola dasar pelaksanaan dan pengelolaan perparkiran.

Kemampuan aparat pengelola perparkiran sangat penting karena dengan kemampuannya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dapat memahami dan mengerti akan tugas-tugas yang diembannya, dengan demikian berarti mempertanggung jawabkan segala hal yang menjadi tugasnya. Sementara itu agar kiranya pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif menuju pencapaian tujuan yang diharapkan tentu dibutuhkan suatu program yang disusun berdasarkan rencana-rencana yang mantap, mulai dari sarana prasarana, sumber daya, hingga kepada pelaksanaannya. Demikian pula dengan peningkatan pengawasan, hal ini sangat menunjang pelaksanaan rencana atau program yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi bersangkutan, karena pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemantapan pengawasan juga bertujuan untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini Dipenda Tk. II Ujung Pandang sebagai penanggung jawab pengelolaan perparkiran.

2. Menertipkan pengelolaan pemungutan retribusi parkir antra Dipenda Tk. II Ujung Pandang dengan PT. Purina.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan pelaksana pengelolaan perparkiran di Ujung Pandang.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang ditawarkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepentingan pengelola perparkiran.

Melihat tujuan pengawasan di atas, bila dihubungkan dengan struktur organisasi pengelolaan pemungutan retribusi parkir, pada kenyataannya telah dimiliki, tetapi realisasi hasil, pelaksanaan perparkiran masih menemui beberapa hambatan. Ini menandakan bahwa Unit-unit terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi, kemudian hasil evaluasi tersebut dapat dirumuskan dengan mantap melalui rapat-rapat koordinasi, sehingga semua unit-uniti terkait terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian hasil pelaksanaan rencana/program yang ditetapkan bersama-sama.

BAB V

P E N U T U P

Dari uraian-uraian setiap bab dan sub bab dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, dimana analisa hasil penelitian menunjukkan pengelolaan retribusi parkir Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina di Ujung Pandang sangat dipengaruhi oleh kemantapan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, maka dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan pengelolaan perparkiran di Ujung Pandang merupakan suatu perluasan pendapatan asli daerah yang memiliki prospek masa depan karena ditunjang oleh besarnya populasi pengguna jasa parkir yang memungkinkan memperoleh pemungutan retribusi parkir cukup besar pula.
2. Jalinan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT.Purina merupakan salah satu usaha pengembangan pengelolaan perparkiran, walaupun untuk memenuhi target pemungutan retribusi parkir belum terpenuhi

sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada PT. Purina sebagai pelaksana operasional pemungutan retribusi parkir.

3. Pengelolaan retribusi parkir antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina telah berjalan dengan lancar, walaupun masih dibutuhkan pematapan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan koordinasi serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Unit-Unit, bagian-bagian sebagai unsur terkait dalam pengelolaan per-parkiran.
4. Dalam kegiatan perencanaan telah melibatkan beberapa unsur-unsur terkait, dan untuk menentukan rencana/program selanjutnya terlebih dahulu menilai dan mengevaluasi hasil-hasil kerja dan laporannya yang dimulai dari unit-unit tingkat bawah sampai pada tingkat atasannya. Dalam kegiatan perencanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir diupayakan suatu rencana yang terpadu, serasi dan merata, dan untuk mencapainya dibutuhkan suatu pola perencanaan yang menjadi pedoman setiap Unit-unit kerja perparkiran.
5. Pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir telah terlaksana sesuai strukturalnya, dimana semua unit-unit, unsur terkait dilibatkan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, semua ini dilakukan

untuk mencapai keseragaman pelaksanaan rencana/program kerja perparkiran.

6. Ditinjau dari hasil-hasil yang dicapai yang jauh dari target memungkinkan perlunya peningkatan kemampuan pengawasan terutama dalam melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan perparkiran, membutuhkan ketelitian dan kecermatan di dalam mengambil keputusan dan rencana-rencana selanjutnya, agar apa yang diharapkan dapat tercapai.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemungutan retribusi parkir dipandang perlu meningkatkan dan memantapkan pengelolaan antara Dipenda Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Purina sebagai pelaksana operasional.
2. Agar kemantapan pengelolaan pemungutan retribusi parkir dapat tercapai, maka diperlukan kemantapan peningkatan di dalam penetapan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan serta peningkatan pengendalian dan pengawasan dengan tidak mengenyampingkan kemampuan aparat pengelolanya.
3. Dalam pengelolaan perencanaan sebaiknya memperhatikan sarana perparkiran yang layak, guna menumbuhkan ke-

sadaran pengguna jasa parkir untuk bergairah membayar retribusi parkir, meningkatnya kesadaran dan simpatik pengguna jasa parkir sangatlah besar peranannya di dalam pencapaian target pemerintah daerah di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kotamadya Ujung Pandang.

4. Masih adanya tempat-tempat parkir yang terdapat pada lokasi parkir memungkinkan perlunya peninjauan kembali hasil-hasil penelitian dan pengembangan dan melakukan perbaikan-perbaikan menuju tercapainya kelayakan pengelolaan pemungutan retribusi parkir, kesemuanya ini tentu dibutuhkan kemampuan aparat pengelola perparkiran yang cukup memadai.
5. Demikian pula dalam segi pengendalian dan pengawasannya, dibutuhkan aparat yang betul-betul mampu dalam bidangnya hal ini sangat penting karena, pengelolaan perparkiran menggunakan banyak tenaga kerja dengan wilayah yang luas sehingga dianggap rumit dan kompleks, untuk mencapai pelaksanaan yang mantap tentu dibutuhkan aparat yang betul-betul berkemampuan dalam bidang pengawasan.
6. Disarankan pula agar kiranya rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan lebih ditingkatkan dengan menetapkan jadwal pertemuan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, hal ini memudahkan pengawasan dan sebagai kontrol sosial aparat pengelola perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmosudirdjo, Prajuni, 1979. Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan. Jakarta : Ghalia Indonesia.
2. Djarwanto PS. 1984. Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknik Penulisan Skripsi. Yogyakarta : Liberty.
3. Esmara, Hendra. 1986. Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia. Jakarta : Gramedia.
4. Hadi, Sutrisno. 1986. Statistik II. Yogyakarta : UGM.
5. Handayaniingrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.
6. Mansyur, Cholod M. 1981. Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Surabaya : Usaha Nasional.
7. Manullang, H. 1981. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
8. Poerwadarinta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
9. Soedjatmoko. 1984. Pembangunan dan Kebebasan. Jakarta Lembaga Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial.
10. Soemitro, Rachmat. 1965. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Jakarta : Erosco.
11. Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 1985. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES.
12. Tjokroamidjojo, Bintor. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
13. The Liang Gie. 1980. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Nur Cahaya.

14. Umar, Achmad. 1988 (Rangkuman) Administrasi dan Management Ujung Pandang : LAN - RI.
15. Widjaja, A.W. 1987. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta : PT. Bina Aksara.
16. Republik Indonesia, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 1988. Jakarta : Team Pembina Penatar dan Bahan Penatar Pegawai Republik Indonesia.
17. Undang-Undang Darurat tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Nomor 12 Tahun 1957.
18. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1993, tentang Ketentuan Perpajakan di Kotamadya Ujung Pandang.
19. Anonim, 1991. Pedoman Penyusunan Skripsi. Ujung Pandang : FISIPOL UNIVERSITAS "45".
20. Surat Keputusan Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Sistem Bulanan bagi Kendaraan yang Menggunakan Jalanan/Pelataran sebagai Tempat Parkir dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang, Nomor : 567/S.Kep/551.21/94.
21. Surat Keputusan tentang Pengaturan Kembali Tempat-Tempat Parkir dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 6278 Tahun 1994.

